

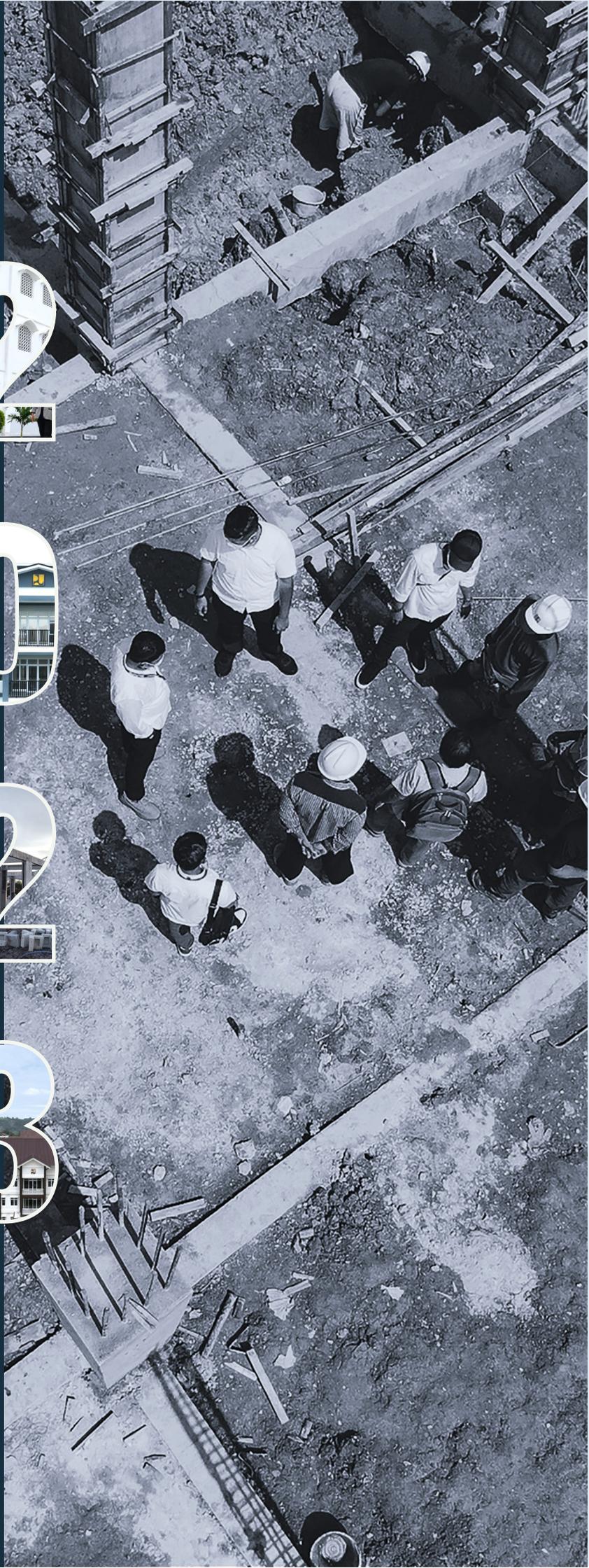


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN
SUMATERA III





Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya.

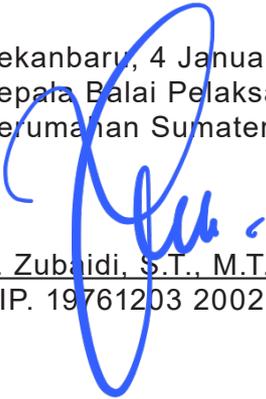
Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja ini menyajikan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023 dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perumahan melalui pelaksanaan sasaran “Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau”.

Laporan Kinerja ini menggambarkan dinamika Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III termasuk dinamika satuan kerja sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Balai yang telah disusun dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2020-2024.

Selain itu, laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pekanbaru, 4 Januari 2024
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Sumatera III


Ir. Zubaidi, S.T., M.T., CROP
NIP. 19761203 200212 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF





A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan yang mendukung **Sasaran Strategis 3 (SS-3)** “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau”, **Sasaran Program** “Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni”, dan **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni”.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan ketersediaan rumah yang layak huni, Direktorat Jenderal Perumahan juga melaksanakan kegiatan yang mendukung **Sasaran Strategis 5 (SS-5)** “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”, **Sasaran Program** “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”, dan **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan”.

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III memiliki tujuan secara umum, yaitu *“terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”*. Sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
- d. Melaksanakan pembangunan rumah susun; dan
- e. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Capaian kinerja

1. Capaian Kinerja Utama

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan dengan *output* sebagai capaian terhadap dua sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan. Kegiatan tersebut diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang pelaksanaannya mencakup tiga wilayah, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.1. Capaian kinerja utama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target PK 2023	Realisasi 2023	Capaian
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 laporan	6 laporan	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 unit	10.604 unit	99,66%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 unit	371 unit	100%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 tower	17 tower	100%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	100 unit	100 unit	100%
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	75 unit	75 unit	100%
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 unit	2.547 unit	128,96%
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 laporan	2 laporan	100%
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 layanan	4 layanan	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 layanan	4 layanan	100%

2. Capaian Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga melaksanakan dukungan kegiatan lainnya, yaitu:

- a. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Dalam rangka menjaga kredibilitas institusi dan meningkatkan kepercayaan publik serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (*fraud*), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berupaya menciptakan budaya kerja anti penyuapan dan telah mendapatkan sertifikasi dalam penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 27 Juli 2023
- b. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menjadi pelaksana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan balai dengan membentuk enam Pokja, yaitu Manajemen Perubahan, Penata Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III saat ini adalah dengan mengembangkan inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjawab ekspektasi pengguna layanan, baik internal unit

maupun eksternal serta masyarakat luas melalui inovasi yang diterapkan, yaitu:

- 1) Pemberian apresiasi *staff of the month*;
 - 2) Aplikasi SMART3;
 - 3) Podcast (Rapat Koordinasi dan Bincang Seru Berintegritas) melalui *Morning Briefing* dan Rapat Koordinasi;
 - 4) Layanan PA'CIK (Pelayanan dan Klinik Perumahan berbasis Chatbot yang informatif dan Komunikatif).
- e. Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS)
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:
- 1) Perencanaan rumah 37,2%;
 - 2) Pelaksanaan konstruksi 7,7%;
 - 3) Pengawasan konstruksi 0,3%;
 - 4) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan rumah 54,8%.
- d. Aksi kolaborasi program BSPS dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)
- 1) Kolaborasi bersama BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memberi bantuan pada kegiatan BSPS-PKE berupa peningkatan kualitas sanitasi pada rumah sebanyak 25 penerima bantuan senilai 7,5 juta rupiah pada Kabupaten Padang, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman.
 - 2) Kolaborasi bersama PT Semen Padang
Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan PT Semen Padang melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 Juli 2023 dilaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 114 zak semen untuk 57 rumah penerima bantuan di area Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Provinsi Sumatera Barat;
 - Penyerahan bantuan sebanyak 100 zak semen untuk 50 rumah penerima bantuan di area Kota Pekanbaru, serta bantuan 500 zak semen dalam rangka penanganan PKE di Desa Centai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
 - 3) Kolaborasi bersama PT. Propan Raya ICC
Pada bulan Februari tahun 2023 telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perumahan dengan PT Propan Raya ICC dan mendukung kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai berikut:
 - Dukungan bantuan BSPS-PKE sebanyak 10 unit penerima bantuan di Provinsi Riau;
 - Dukungan bantuan PKE di desa Centai, Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Balai dan Satuan Kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023, yaitu:

- a. Sertifikasi dalam penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 27 Juli 2023.
- b. Apresiasi Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun TA 2020-2022 melalui pemberian dukungan pekerjaan lanjutan menuju Bangunan Gedung Hijau (BGH)

pada kegiatan HAPERNAS 2023 “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan dan Terjangkau untuk Semua”. Dukungan ini diberikan terhadap Rumah Susun Pemkot Batam (Rusun Muka Kuning 2 Batamindo) dan Rumah Susun Asrama STT Real yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.

4. Realisasi Anggaran

Sebagai bentuk upaya dalam merealisasikan komitmen pada Perjanjian Kinerja, pada tahun 2023 balai dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mendapatkan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 475.061.203.000 dengan pembagian pagu sebagai berikut:

- a. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Tabel 1.2. Realisasi keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.932.911	4.928.004	99,00	100,00
2 Program Dukungan Manajemen	3.933.990	3.907.668	99,90	100,00
Total	8.866.901	8.835.672	99,65	100,00

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.866.901.000 dengan realisasi sebesar 99,65% terhadap pagu anggaran dan realisasi fisik mencapai 100%.

- b. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3. Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	194.978.355	193.573.893	99,28	95,05
2 Program Dukungan Manajemen	1.134.218	1.122.337	98,95	100,00
Total	196.112.573	194.696.230	99,28	95,08

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.112.573.000 dengan realisasi sebesar 99,28% terhadap pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 95,08%.

- c. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Tabel 1.4. Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	128.422.100	128.348.680	99,94	99,84
2 Program Dukungan Manajemen	1.155.354	1.154.997	99,97	100,00
Total	129.577.454	129.503.677	99,94	99,85

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.577.454.000 dengan realisasi sebesar 99,94% terhadap pagu anggaran dan

realisasi fisik sebesar 99,85%.

d. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 1.5. Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	139.154.052	138.277.641	99,37	100
2	Program Dukungan Manajemen	1.350.223	1.348.590	99,88	100
Total		140.504.275	139.626.231	99,38	100

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.504.275.000 dengan realisasi 99,38% terhadap pagu anggaran dan realisasi fisik mencapai 100%.

C. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah/pengusul bantuan terkait *Readiness Criteria* bantuan bidang perumahan;
- Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data perumahan yang komprehensif;
- Keterbatasan dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP;
- Masih terdapat ego sektoral terkait kolaborasi data akibat minimnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan atau basis data terkait PKP;
- Adanya *refocussing* anggaran;
- Masih terdapat dokumen usulan yang kurang atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- Pemahaman calon penerima bantuan masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan;
- Proses pelaksanaan fisik kegiatan terdampak ketersediaan bahan, alat, material, jumlah tenaga kerja, maupun kondisi cuaca;
- Kurangnya kedisiplinan para pekerja di lokasi konstruksi;
- Kelengkapan dokumen administrasi terlambat diproses;
- Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan *action plan* yang telah disusun.

Dalam rangka meningkatkan perbaikan kinerja sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah/pengusul bantuan terkait *Readiness Criteria* pemberian bantuan bidang perumahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pemenuhan kebutuhan data perumahan serta penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP;
- Melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan sumber daya;
- Memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait persyaratan usulan maupun pelaksanaan bantuan perumahan;
- Memaksimalkan bahan, alat dan material lokal di sekitar lokasi pembangunan serta melakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah pekerja maupun kondisi cuaca yang tidak menentu;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan maupun kelengkapan dokumen administrasi secara rutin.

Kata Pengantar	iii		
Ringkasan Eksekutif	v		
Bab 1		Bab 2	
Pendahuluan	1	Perencanaan Kinerja	7
1.1 Latar Belakang	3	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	10
1.2 Tugas dan Fungsi	3	2.2 Perjanjian Kinerja	12
1.3 Struktur Organisasi	4	2.3 Metode Pengukuran	13
1.4 Isu Strategis	6	2.4 Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Rencana Strategis	14



Bab 3		Bab 4	
Kapasitas Organisasi	15	Akuntabilitas Kinerja	41
3.1 Sumber Daya Manusia	17	4.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2 Sarana dan Prasarana	29	4.2 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	68
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	33	4.3 Realisasi Anggaran	72
		Penutup	73

DAFTAR

ISI





BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk perwujudan kewajiban dari setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PUPR telah diatur melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengamanatkan bahwa setiap unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis dan satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja ini menyajikan realisasi capaian atas penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. penyusunan rencana teknis Pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dipimpin oleh seorang kepala balai dan didukung organisasi dengan susunan sebagai berikut:



Gambar.1.1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha
Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas provinsi Sumatera Barat serta wilayah II bertanggung jawab atas provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I dan II.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut:
 - 1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan
 - 3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
- 2) PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial
PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan.
- 3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.
- 4) Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.



1.4 Isu Strategis

Isu strategis (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 yaitu:

- a. Kurangnya kemandirian Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya terkait penyusunan dokumen RP3KP;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan serah terima aset di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III;
- c. Adanya perubahan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan balai;
- d. Belum optimalnya basis data bidang perumahan;
- e. Proses pelaksanaan fisik terkendala ketersediaan material, jumlah tenaga kerja, dan masih terdampak kondisi cuaca.



BAB 2



PERENCANAAN KINERJA





2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

1.1.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) Kementerian PUPR periode 2020-2024 “Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau”.

Tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perumahan dilaksanakan sebagai upaya mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta mewujudkan misi kedua Kementerian PUPR, yaitu menyelenggarakan Pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni yaitu melalui:

- a. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misalnya bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan Pembangunan); serta
- b. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan dua Program, yaitu:

- a. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni yang diukur menggunakan dua indikator, yaitu:
 - 1) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; dan
 - 2) Persentase rumah bagi MBR yang mendapat PSU.
- b. **Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan**, dengan sasaran untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

1.1.2 Tujuan dan Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III memiliki tujuan secara umum, yaitu **“terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**.

Sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
- d. Melaksanakan pembangunan rumah susun;
- e. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku Pembangunan rumah umum dan komersial.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan terhadap dua sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang pelaksanaannya mencakup tiga wilayah, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.1 Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan			
		Sumbar	Riau	Kep. Riau	
SS-3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 unit	6.078 unit	3.062 unit	1.500 unit
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 unit	135 unit	141 unit	95 unit
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 tower	8 tower	5 tower	4 tower
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	100 unit	-	-	100 unit
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	75 unit	75 unit	-	-
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 unit	650 unit	450 unit	875 unit
SS-5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan					
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Sehubungan dengan kebijakan pembangunan perumahan sesuai rencana strategis Kementerian PUPR, arah kebijakan penyelenggaraan perumahan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perumahan difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang dilaksanakan dengan tiga strategi, yaitu:

- Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah;
- Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah; dan
- Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif.

Secara rinci rumusan kebijakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Kebijakan	Strategi
1. Pembangunan penyediaan rumah baru yang layak huni dan peningkatan kualitas RTLH	a. Pelaksanaan pembangunan rumah susun bagi MBR, buruh, pekerja, ASN/TNI/POLRI, Ponpes dan Perguruan Tinggi
	b. Pelaksanaan pembangunan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya
	c. Pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya
	d. Pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas RTLH melalui pengoptimalan keswadayaan masyarakat, dukungan pemda, dan stakeholder, serta pemanfaatan bahan/material lokal
	e. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan PSU dalam penyediaan perumahan bagi MBR
	f. Pelaksanaan pembinaan RP3KP, pengembangan perumahan skala besar, dan komunitas

Kebijakan		Strategi	
2	Menerapkan peraturan keuangan, BMN dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan	a	Penyediaan layanan dukungan manajemen perkantoran
		b	Melaksanakan penyebaran sistem informasi
		c	Menyediakan perlengkapan dan peralatan perkantoran
		d	Melaksanakan pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana perkantoran

2.2 Perjanjian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Perumahan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Zuhaidi
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Iwan Suprijanto
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, Januari 2023	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001	Zuhaidi NIP. 19761203 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.750 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	375 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Tower
	5 Jumlah rumah khusus yang dibangun	269 Unit
	6 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	600 Unit
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
Kegiatan:		Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		Rp 389.898.327.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 4.637.581.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 116.902.617.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 69.563.872.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 198.794.257.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		Rp 5.850.000.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 3.533.990.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 725.540.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 676.232.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 914.238.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 8.171.571.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 117.628.157.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 70.240.104.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 199.708.495.000
Total Rp		395.748.327.000
Direktur Jenderal Perumahan		Jakarta, Januari 2023
		Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III
Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001		 Zuhaidi NIP. 19761203 200212 1 004

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Zubaidi**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama



Zubaidi
NIP. 19741203 200212 1 004

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 Tower
	5 Jumlah rumah khusus yang dibangun	100 Unit
	6 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	75 Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata laksana penyelenggaraan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan

Kegiatan:

	Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp 467.487.418.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Rp 4.932.911.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	Rp 128.422.100.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp 139.154.052.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 194.978.355.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 7.573.785.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Rp 3.933.990.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	Rp 1.153.354.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp 1.350.223.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 1.136.218.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Rp 8.866.901.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	Rp 129.577.454.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp 140.504.275.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 196.112.573.000
Total	Rp 475.061.203.000

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Jakarta, 21 Desember 2023

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III



Zubaidi
NIP. 19741203 200212 1 004

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. Pengukuran kinerja dilakukan dengan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai.

Perhitungan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan.

Pengukuran terhadap persentase capaian dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2.4 Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Rencana Strategis

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III merupakan sasaran yang akan dicapai melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2020-2024 sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.3 *Matriks Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2020-2024*

Program/Kegiatan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SS-3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau							
SP. Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman							
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	3	3	3	3
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	13.220	6.150	6.360	9.510	10.980
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	0	511	819	1.018	864
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	16	10	30	30	26
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	30	90	120	120	120
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	Unit	0	30	30	0	0
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	0	2.000	2.749	3.500	4.441
Program Dukungan Manajemen							
SS-5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya							
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya							
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	3	3	3	3	3
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3	3	3	3	3
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3	3	3	3	3

Target capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 berdasarkan rencana strategis periode 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

- Jumlah laporan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan sebanyak 3 laporan;
- Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 9.510 unit;
- Jumlah rumah susun yang dibangun sebanyak 1.018 unit;
- Jumlah rumah susun yang diperlihara sebanyak 30 tower;
- Jumlah rumah khusus yang dibangun sebanyak 120 unit;
- Jumlah rumah khusus yang dipelihara sebanyak 0 unit; dan
- Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU sebanyak 1.374 unit.

Berbeda halnya dengan target pada Rencana Strategis 2020-2024, target capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- Jumlah laporan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan sebanyak 6 laporan;
- Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 10.640 unit;
- Jumlah rumah susun yang dibangun sebanyak 371 unit;
- Jumlah rumah susun yang diperlihara sebanyak 17 tower;
- Jumlah rumah khusus yang dibangun sebanyak 100 unit;
- Jumlah rumah khusus yang dipelihara sebanyak 75 unit; dan
- Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU sebanyak 1.975 unit.

BAB 3



KAPASITAS ORGANISAS

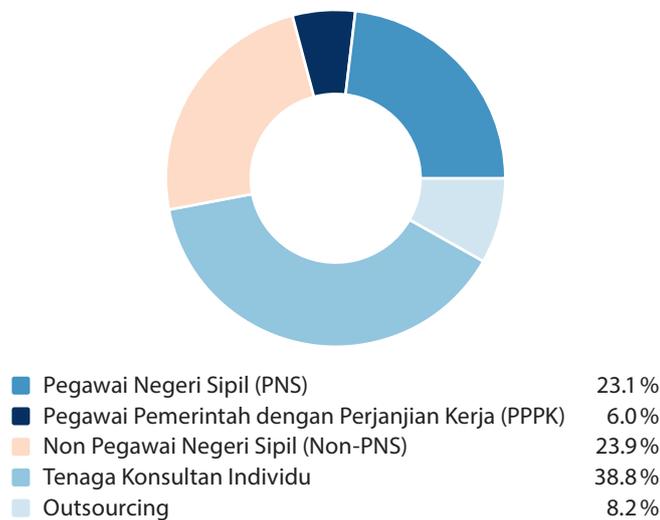


3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi.

Suatu organisasi perlu didukung pegawai yang sesuai baik dari kuantitas, kualitas, strategi, dan operasional yang baik untuk mencapai tujuannya. Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja organisasi, diperlukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung oleh sumber daya manusia yang tersebar di balai maupun satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 134 orang yang terdiri atas 31 orang PNS, 8 (delapan) orang PPPK, 32 orang non-PNS, 52 orang tenaga konsultan individual, dan 11 orang tenaga *outsourcing* dengan gambaran proporsi sebagai berikut:



Gambar 3.1. Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia yang mencakup wilayah kerja Balai, Satuan Kerja Penyediaan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III				
1	Ir. Zubaidi, S.T., M.T.	Kepala Balai	PNS	S2 - Magister Teknik Sipil
2	Rita Hartati, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	PNS	S2 - Magister Manajemen SDM
3	Henny Ferniza, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I	PNS	S2 - Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
4	Heby Rakasiwi, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II	PNS	S2 - Magister Teknik Sipil

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
5	Elizabeth L A Hutapea, S.T., M.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama & Jab. Rangkap PP-SPM	PNS	S2 - Magister Arsitektur
6	Rika Fallini, S.E.	Jab. Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir & Jab. Rangkap Bendahara Pengeluaran	PNS	S1 - Ekonomi Manajemen
7	Andri Septian, S.T.	Jab. Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	PNS	S1 - Teknik Informatika
8	Rizqia Fawatihu Rahmah, S.Ars.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
9	Loise Anggraini Pasaribu, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
10	Syafrudin, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PPPK	S1 - Teknik Sipil
11	Arie Putra Pangaribuan, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PPPK	S1 - Teknik Sipil
12	Sabila Khalmi, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PPPK	S1 - Arsitektur
13	Astuti Dwi Putri, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PPPK	S1 - Teknik Sipil
14	Aldita Khairunnisa, S.I.Kom	Ahli Pertama - Arsiparis	PPPK	S1 - Ilmu Komunikasi
15	Fazlina Amalia Sunes, S.T	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	PPPK	S1 - Teknik Sipil
16	Fadil Anugrah Prasetyo, S.IP	Ahli Pertama - Arsiparis	PPPK	S1 - Ilmu Pemerintahan
17	Angga Hendrawan Putra, S.E	Ahli Pertama - Perencana	PPPK	S1 - Akuntansi
18	Ridho Wijaya. S.Sos.	Tenaga Informasi dan Publikasi	Non-PNS	S1 - Ilmu Pemerintahan
19	Dina Oektanita. S.Pd.	Penyusun Monev dan Pelaporan	Non-PNS	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris
20	Rika Marsella, S.Kom.	Penelaah BMN	Non-PNS	S-1 Sistem Informasi
21	Rio Desriwaldi	Pengadministrasian Umum	Non-PNS	SMK - Busines Manajemen
22	Amalia Syarafina, S.T.	Tenaga Ahli Perumahan	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Arsitektur
23	Shindy Reza Pahlefi, S.M.	Tenaga Administrasi	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
24	Widri Khairani, S.Sos.	Tenaga Administrasi	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Hub. Internasional
25	Ma'ruf Bagas Anggadha, S.Kom.	Operator Sibaru	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Informatika
26	Toat Setiadji, A.md.	Tenaga Surveyor dan Pendataan	Tenaga Konsultan Individu	D3 - Akuntansi

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
27	Ghity Mayang Sari, S.T.	KI Pendataan Prov Sumatera Barat	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Planologi
28	Lutfian Eka Putri, S.T.	KI Kelembagaan Prov Sumatera Barat	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Arsitektur
29	Fabiola Fitriana, S.T.	KI Perencanaan Prov Sumatera Barat	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Planologi
30	Tedjo Sukmono, S.E.	KI Kelembagaan Prov Kepulauan Riau	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
31	Harold Maurice Samosir, S.T.	KI Pendataan Prov Kepulauan Riau	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Geologi
32	Muhammad Reza Ferlianda	Security	Outsourcing	D3 - Manajemen Informatika
33	Refqi Pratama	Security	Outsourcing	SMK
34	Angga Fadilia	Sopir	Outsourcing	SMK
35	Fikri May Putra	Pramubakti	Outsourcing	SMA
36	Riswandi	Pramubakti	Outsourcing	SMA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT				
1	Tony Hermanto, S.T., M.T.	Kepala Satuan Kerja	PNS	S1 - Teknik Sipil
2	Riky Hidayat, S.T.	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	PNS	S1 - Teknik Sipil & Perencanaan
3	Mardianto, S.T.	PPK Swadya dan RUK	PNS	S1 - Teknik Sipil
4	Widia Yulianti, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama & Jab. Rangkap PP-SPM	PNS	S1 - Teknik Lingkungan
5	Eriyanto, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran	PNS	S1 - Ilmu Adm Negara Administrasi
6	Deshendri, S.Sos., M.M.	Analisis Penyediaan Perumahan	PNS	S2 - Magister Manajemen
7	Dedy Mirza Yulianto, S.T., M.T.	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	PNS	S2 - Magister Teknik Sipil
8	Ali Asmi Zesra, S.T., M.T.	Pelaksana Teknik	PNS	S2 - Magister Teknik Sipil
9	Hendra Trisno, S.E.	Penelaah Keuangan	Non-PNS	S1 - Ekonomi
10	Siti Alivia Utari, S.H.	Penelaah BMN	Non-PNS	S1 - Hukum
11	Novendra Adi Maulana, S.T.	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non-PNS	S1 - Teknik Mesin
12	Ridho Adriadi, S.E.	Penelaah Keuangan	Non-PNS	S1 - Ekonomi
13	Sonia Vivera Sabda, S.E.	Penelaah BMN	Non-PNS	S1- Ekonomi
14	Hendri Kurnia, S.T.	Pelaksana Teknik	Non-PNS	S1 - Teknik Sipil
15	Nisa Ramadhani, S.T.	Pelaksana Teknik	Non-PNS	S1 - Teknik Planologi
16	Banu Desta Rini, S.T.	Penata Teknik	Non-PNS	S1 - Teknik Sipil
17	Dessy Marlina, A.Md.	Penata BMN	Non-PNS	D3 - Ekonomi
18	Hendri Dunan	Pengemudi	Non-PNS	SMA
19	Weno Aulia Aldrin, S.E.	KI Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Akuntansi
20	Rezky Aji Satria, P. W, S.Kom	KI Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Sistem Informasi
21	Melta Sari Ulfani, S.H., M.H.	KI Randal	Tenaga Konsultan Individu	S2 - Hukum

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
22	Annisa Utami, S.Pd.	KI Rusun	Tenaga Konsultan Individu	S2 - Teknik Sipil
23	Medisa Hardoseti, S.IP.	KI Rusun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Ilmu Pemerintahan
24	Ilma Hanifa, S.T.	KI Rusun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
25	Ade Sukma Pratama, S.Hum.	KI Rusus	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Humaniora Sastra
26	Yuni Aulia Hasibuan, S.T.,M.T.	TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S2 - Teknik Sipil
27	Yulda, S.T.	TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
28	Noviza Rahmi, S.Kom.	Ass TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Sistem Informasi
29	Riko Vernandes, S.E.	Ass TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Ekonomi Manajemen
30	Nora Rahayu S.H.	Ass TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Hukum
31	Vashtia Nissa Yalfis, S.T.	Ass TA Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Hukum
32	Wendi Marjoni		OutSourcing	SMA
33	Muhammad Arif		OutSourcing	SMA
34	Reno		OutSourcing	SMA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU				
1	Octavianus Siahhaan, S.T., M.Si.	Kepala Satuan Kerja	PNS	S2 - Magister Ilmu Administrasi
2	Saiwan, S.T.	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
3	Suwindar Agung, S.SE.	PPK Swadya dan RUK	PNS	S1 - Manajemen
4	Nauval Edwar, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama & Jab. Rangkap PPSPM	PNS	S1 - Teknik Lingkungan
5	Yuslaini, S.E., M.M.	Bendahara Pengeluaran	PNS	S2 - Magister Manajemen
6	Annisa Diah Astarini, S.T.	Mengikuti Program Beasiswa (Tugas Belajar)	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
7	Ghina Revita Sakinah, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PNS	S1 - Arsitektur
8	Monasari. S.Ds.	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non-PNS	S1 - Design Interior
9	Winda Nurhidayati, S.E.	Penelaah Keuangan	Non-PNS	S1 - Ekonomi Akutansi
10	Riski Rahmadani,	Penyusun Monev dan Pelaporan	Non-PNS	S1 - Matematika
11	Een Said Akbar, S.T.	Pelaksana Teknik	Non-PNS	S1 - Teknik Informatika
12	Yoanda Adimas Putra, A.Md.	Penata Teknik	Non-PNS	D3 - Teknik Sipil
13	Rosi Destria Candra Dinata	Pengadministrasian Umum	Non-PNS	SMU
14	Ferry Sugara	Pengadministrasian Umum	Non-PNS	SMK - Akutansi

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
15	Minsarwedi Situmeang, S.P, M.M.	Tenaga Ahli Manajemen BPS	Tenaga Konsultan Individu	S2 - Manajemen
16	Zulviecar Novsky, S.T.	Tenaga Ahli Konstruksi BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
17	Drs. Zulkani	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Pendidikan Agama Islam
18	Radinal Dahnur, S.Kom.	Asisten Tenaga Ahli Manajemen BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Sistem Informasi
19	Koswara, S.E.	Asisten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
20	Banar Supriyadi Putra, S.T..	Asisten Tenaga Ahli Konstruksi BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
21	Dodi Kusuma, S.H.	KI BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Ilmu Hukum
22	Andre Kurniawan, S.H.	KI BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Ilmu Hukum
23	Roby Agustin, S.E.	KI BPS	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
24	Sintya Marissa, S.Pd.	KI PSU	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Pendidikan Teknik Sipil
25	Muhammad Afrinaldy, S.E.	KI Tenaga Administrasi Rumah Susun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Akuntansi
26	Aulia Putri Rizki, S.T.	KI Rumah Susun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Arsitektur
27	Dinda Nabila Alzikri, S.T.	KI Rumah Susun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Arsitektur
28	Nanda Alifah Nafsani, S.E.	KI PSU	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
29	Viola Sinta, S.Ikom	KI Administrasi Rumah Susun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Ilmu Komunikasi
30	Rumandang	Petugas Kebersihan	Outsourcing	SMA
31	Rio Deby, S.Pi	Satpam	Outsourcing	S1 - Perikanan
32	Ruswandi	Pengemudi	Outsourcing	SMA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
1	Andi, S.T.	Kepala Satuan Kerja	PNS	S1 - Teknik Sipil
2	Tarmizi, S.T., M.Si.	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	PNS	S2 - Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
3	Evi Linawaty Parsaulian, S.H., M.H.	PPK Swadya dan RUK	PNS	S2 - Magister Hukum
4	Vitalis Vicky Hanggara, S.T.	jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama & Jab. Rangkap PP-SPM	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
5	Mochammad Taufik, S.E.	Bendahara Pengeluaran	PNS	S1 - Sarjana Ekonomi
6	Lisa Rahmadhani Utami, S.Ars.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PNS	S1 - Teknik Arsitektur
7	Muhammad Faisal Ridho, S.T.	Jab. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PNS	S1 - Teknik Arsitektur

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN
8	Ajeng Nastiti, S.I.Kom.	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non-PNS	S1 - Ilmu Komunikasi
9	Anselmusluju, S.Kom	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non-PNS	S1 - Teknik Informatika
10	Dewi Syanafiah, S.Ip.	Penyusun Monev dan Pelaporan	Non-PNS	S1 - Ilmu Pemerintahan
11	Fitria Ningsih, S.Sos.	Penelaah BMN	Non-PNS	S1 - Ilmu Administrasi Negara
12	Jayanthi Febrina, S.E.	Penelaah Keuangan	Non-PNS	S1 - Manajemen
13	Nuraini Chassandra, S.E.	Penelaah Keuangan	Non-PNS	S1 - Akuntansi
14	Ekki Lian Saputra, S.Kom.	Penelaah BMN	Non-PNS	S1 - Teknik Informatika
15	Kartiko Buono	Pengadministrasi Umum	Non-PNS	SMA
16	Rony Octora	Pengadministrasi Umum	Non-PNS	SMA
17	Madali	Keamanan	Non-PNS	SMP
18	Sukadi	Pengemudi	Non-PNS	SD
19	Febrianto Dimas Winandar, S.M.	KI Verifikasi dan Monitoring Evaluasi	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
20	Eka Wulandari, S.A.P.	KI Administrasi Rusun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Administrasi Publik
21	Eking Pratama, S.T.	KI Teknis Rusun	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
22	Adi Lestari, S.Sos	Tenaga Ahli Manajemen	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Administrasi Negara
23	Brian Hermawan, S.T.	Tenaga Ahli Pemberdayaan	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Informatika
24	Ni Wahyu Dyah Laksmi Herdayani, S.T.	Tenaga Ahli Konstruksi	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Teknik Sipil
25	Evan Eliezer Timisela, S.H.	Konsultan Individual Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Hukum
26	Rivaldy Sandi Putra, S.E.	Konsultan Individual Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Manajemen
27	Junaidi, S.Sos.	Konsultan Individual Ruswa	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Sosiologi
28	Pratiwi Permata Sari, Amd. Keb.	Konsultan Individual PSU	Tenaga Konsultan Individu	D3 - Kebidanan
29	Redollah Wan Saputra, S.Kom.	Konsultan Individual PSU	Tenaga Konsultan Individu	S1 - Komunikasi
30	Eka Fajar Arbi Antiska, A.Md Keb.	Asisten Tenaga Ahli	Tenaga Konsultan Individu	D3 - Kebidanan
31	Anggi Nirwana	Asisten Tenaga Ahli	Tenaga Konsultan Individu	SMK
32	Nadya Alvirania	Asisten Tenaga Ahli	Tenaga Konsultan Individu	SMA

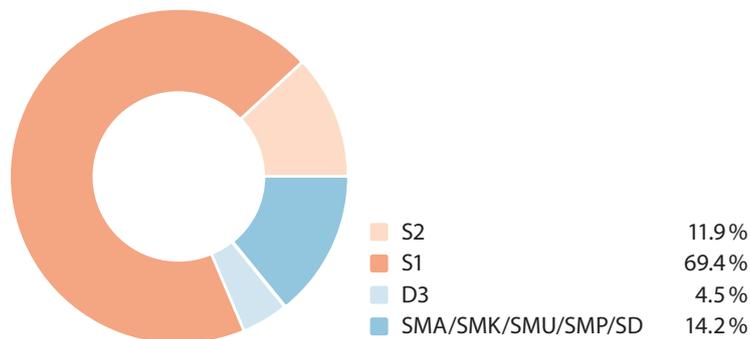
Tabel di atas mencakup pegawai yang terlibat dalam kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III selama tahun 2023. Namun, seiring berjalannya tahun pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan penugasan kepada beberapa pegawai baik di lingkungan satuan kerja maupun balai.

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut ini proporsi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III:

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung oleh 36 orang pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang PNS, 8 orang PPPK, 4 orang non-PNS, 10 orang tenaga konsultan individu, dan 5 orang tenaga outsourcing.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 34 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang PNS, 10 orang non-PNS, 13 orang tenaga konsultan individu, dan 3 orang tenaga outsourcing.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau didukung oleh 32 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang PNS, 7 orang non-PNS, 15 orang tenaga konsultan individu, dan 3 orang tenaga outsourcing.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 32 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang PNS, 11 orang non-PNS, dan 14 orang tenaga outsourcing.

3.1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III merupakan lulusan SD, SMP, SMA/SMU/SMK, D3, S1, dan S2. Berikut gambaran proporsi sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.



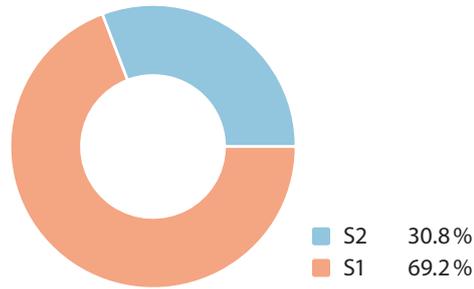
Tabel 3.1 Persentase sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan

Sebagian besar merupakan lulusan S1 sebanyak 93 pegawai dari total sebanyak 134 pegawai.

Tabel 3.2 Sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan

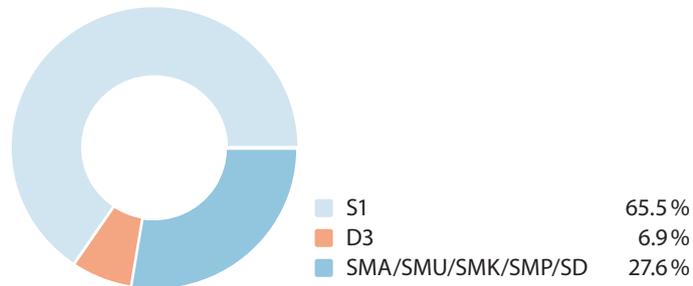
No	Status Kepegawaian	Jenjang Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA/SMU/SMK	SMP	SD
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	19	-	-	-	-
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	8	-	-	-	-
3	Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	-	22	2	6	1	1
4	Tenaga Konsultan Individu	4	43	3	2	-	-
5	Tenaga Outsourcing	-	1	1	9	-	-

Dari total 39 pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 69,2% merupakan lulusan S1.



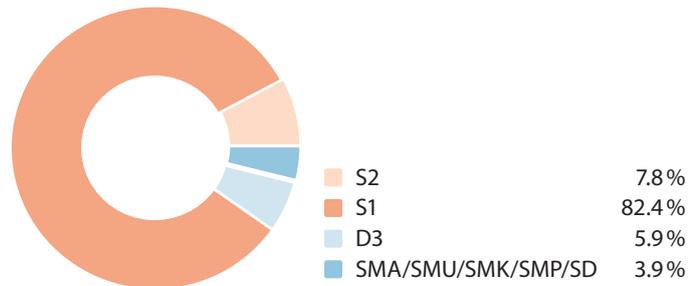
Gambar 3.3. *Persentase PNS dan PPPK berdasarkan jenjang pendidikan*

Dari total 32 pegawai non-PNS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 65,5% merupakan lulusan S1.



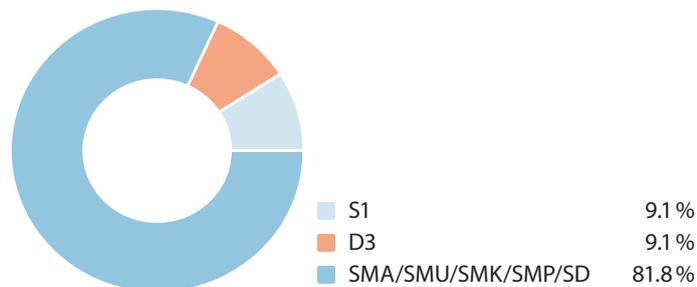
Gambar 3.4. *Persentase non-PNS berdasarkan jenjang pendidikan*

Dari total 52 pegawai tenaga konsultan individu di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 82,4% merupakan lulusan S1.



Gambar 3.5. *Persentase tenaga konsultan individu berdasarkan jenjang pendidikan*

Dari total 11 pegawai tenaga outsourcing di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 81,8% merupakan lulusan SMA/SMU/SMK/SMK/SD.

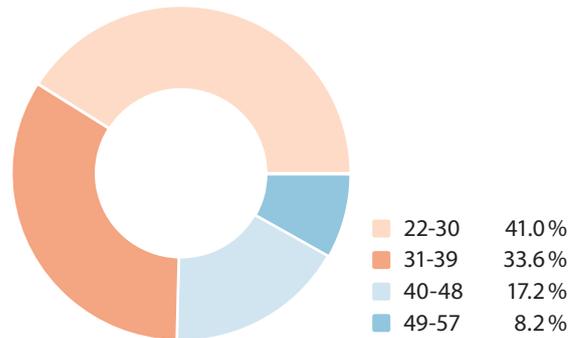


Gambar 3.6. *Persentase tenaga outsourcing berdasarkan jenjang pendidikan*

3.1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia

Berdasarkan kelompok usia, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III terdiri dari kelompok usia 49 – 57 tahun, kelompok usia 40 – 48 tahun, kelompok usia 31 – 39 tahun, dan kelompok usia 22 – 30 tahun.

Berikut gambaran proporsi sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.



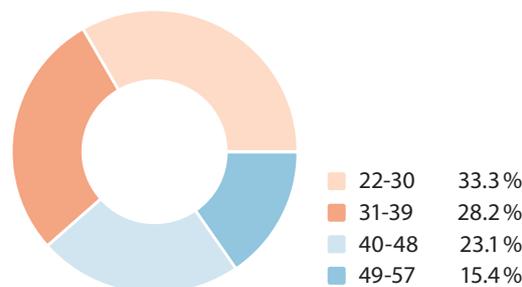
Gambar 3.7. Persentase sumber daya manusia berdasarkan kelompok usia

Dari total 134 pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 55 pegawai atau 41,0% merupakan jumlah kelompok usia tertinggi yaitu 22 – 30 tahun.

Tabel 3.3 Sumber daya manusia berdasarkan kelompok usia

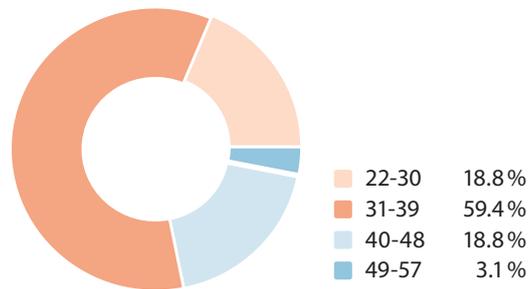
No	Status Kepegawaian	Kelompok Usia			
		22-30	31-39	40-48	49-57
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7	9	9	6
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6	2	0	0
3	Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	6	19	6	1
4	Tenaga Konsultan Individu	33	9	6	4
5	Tenaga Outsourcing	3	6	2	0

Dari total 39 pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 33,3% pegawai merupakan kelompok usia 22 – 30 tahun.



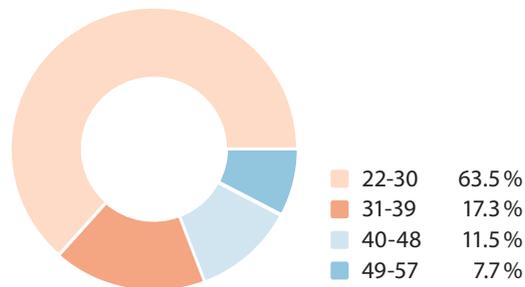
Gambar 3.8. Persentase PNS dan PPPK berdasarkan kelompok usia

Dari total 32 pegawai non-PNS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 59,4 % merupakan kelompok usia 31-39 tahun.



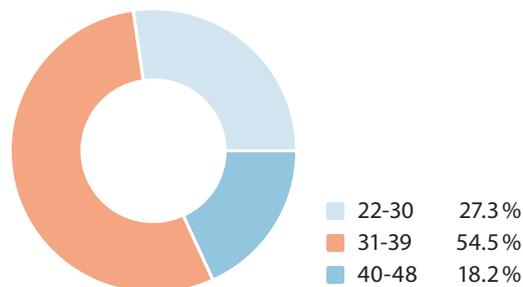
Gambar 3.9. *Persentase non-PNS berdasarkan kelompok usia*

Dari total 52 pegawai tenaga konsultan individu di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 63,5% merupakan kelompok usia 22-30 tahun.



Gambar 3.10. *Persentase tenaga konsultan individu berdasarkan kelompok usia*

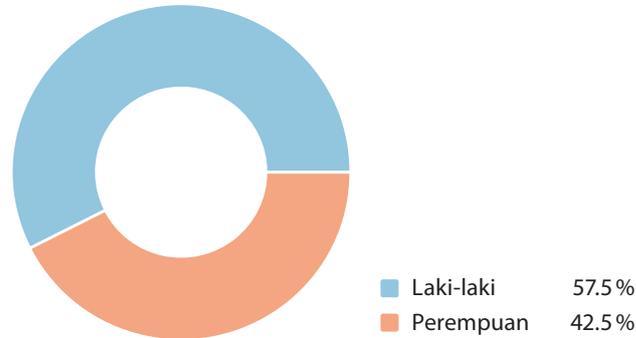
Dari total 11 pegawai tenaga outsourcing di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 54,5% merupakan kelompok usia 31-39 tahun.



Gambar 3.11. *Persentase tenaga outsourcing berdasarkan kelompok usia*

3.1.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin

Berikut gambaran proporsi sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.



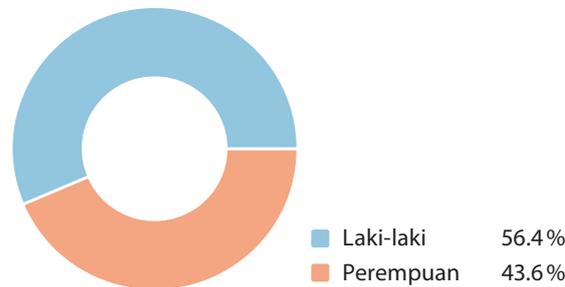
Gambar 3.12. *Persentase sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin*

Berdasarkan jenis kelamin, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III terdiri dari 77 pegawai atau 57,5% merupakan laki-laki dan 57 pegawai atau 42,5% merupakan perempuan.

Tabel 3.4 *Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin*

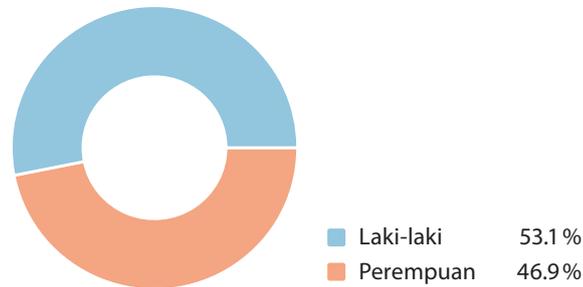
No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	13
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	4	4
3	Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	17	15
4	Tenaga Konsultan Individu	27	25
5	Tenaga Outsourcing	11	0

Dari total 39 pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 56,4% merupakan laki-laki, dan 43,6% merupakan perempuan.



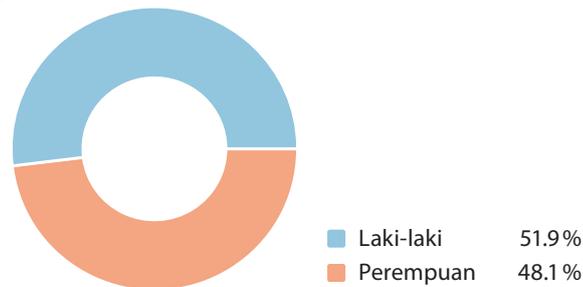
Gambar 3.13. *Persentase PNS dan PPPK berdasarkan jenis kelamin*

Dari total 32 pegawai non-PNS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 53,1% merupakan laki-laki, dan 46,9% merupakan perempuan.



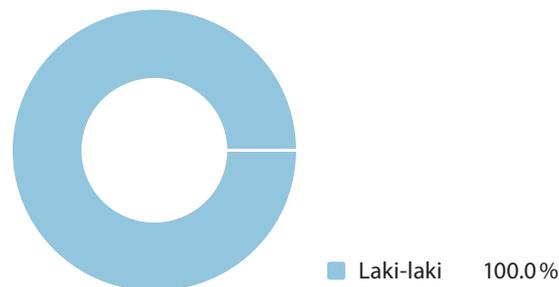
Gambar 3.14. *Persentase non-PNS berdasarkan jenis kelamin*

Dari total 52 pegawai tenaga konsultan individu di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 51,9% merupakan laki-laki, dan 48,1% merupakan perempuan.



Gambar 3.15. *Persentase tenaga konsultan individu berdasarkan jenis kelamin*

Dari total 11 pegawai tenaga outsourcing di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 100% merupakan laki-laki.



Gambar 3.16. *Persentase tenaga outsourcing berdasarkan jenis kelamin*

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023, para pegawai didukung dengan penggunaan perangkat yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Sub-sub Kelompok Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2023		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai	Bertambah		Berkurang		Kuantitas	Nilai
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Peralatan dan Mesin		127	677.405.534	133	832.434.179	12	233.163.680	248	1.276.676.033
Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	Buah	0	0	1	1.221.000	1	1.221.000	0	0
Lemari Kayu	Buah	11	36.630.000	8	85.470.000	0	0	19	122.100.000
Brandkas	Buah	1	7.400.383	0	0	0	0	1	7.400.383
Locker	Buah	0	0	1	8.880.000	0	0	1	8.880.000
Lemari Display	Buah	0	0	1	4.120.000	0	0	1	4.120.000
Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000
LCD Projector/Infocus	Buah	1	9.999.561	0	0	0	0	1	9.999.561
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	5.000.050	0	0	0	0	1	5.000.050
Meja Kerja Besi/Metal	Buah	18	53.240.000	31	127.095.000	0	0	49	180.335.000
Meja Kerja Kayu	Buah	7	24.964.500	6	31.024.500	0	0	13	55.989.000
Kursi Besi/Metal	Buah	40	73.607.106	57	59.607.000	0	0	97	133.214.106
Meja Rapat	Buah	4	33.082.440	1	24.420.000	0	0	5	57.502.440
Backdrop TV/Wardrobe	set	0	0	3	63.270.000	0	0	3	63.270.000
Sofa	set	0	0	1	12.798.999	0	0	1	12.798.999
A.C. Split	Buah	9	49.480.470	0	0	0	0	9	49.480.470
Televisi	Buah	1	7.604.887	0	0	0	0	1	7.604.887
Loudspeaker	Buah	2	13.265.866	0	0	0	0	2	13.265.866
Microphone	Buah	10	26.000.040	0	0	0	0	10	26.000.040
Power Amplifier	Buah	1	7.999.970	0	0	0	0	1	7.999.970
Tripod Camera	Buah	0	0	2	13.000.000	0	0	2	13.000.000
Camera Digital	Buah	0	0	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000
Camera Conference	Buah	1	15.000.040	1	26.000.000	0	0	2	41.000.040
Drone	Buah	0	0	1	17.998.875	0	0	1	17.998.875
Alat Studio Lainnya	dummy	1	17.998.875	3	22.000.000	3	30.998.875	1	9.000.000
P.C Unit	Buah	4	42.600.000	0	0	0	0	4	42.600.000
Lap Top	Buah	0	0	8	200.943.805	0	0	8	200.943.805
Note Book	Buah	8	200.943.805	0	0	8	200.943.805	0	0
Tablet PC	Buah	1	12.999.000	4	74.097.000	0	0	5	87.096.000
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	5.999.950	0	0	0	0	1	5.999.950
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	25.771.971	1	4.500.000	0	0	5	30.271.971
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	7.816.620	1	12.488.000	0	0	2	20.304.620
Laptop Case	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			677.405.534		832.434.179		233.163.680		1.276.676.033

Tabel 3.6 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Sub-sub Kelompok Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2023		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai	Bertambah		Berkurang		Kuantitas	Nilai
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Tanah		1	198,405,000	0	0	1	198,405,000	0	0
Tanah Lapangan Parkir Lainnya	M2	1	198,405,000	0	0	1	198,405,000	0	0
Peralatan dan Mesin		1,209	3,574,187,589	2	73,029,208	2	73,029,208	1,209	3,574,187,589
Lemari Kayu	Buah	175	522,983,526	0	0	0	0	175	522,983,526
Rak Besi	Buah	4	7,756,832	0	0	0	0	4	7,756,832
Brandkas	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
White Board	Buah	1	939,232	0	0	0	0	1	939,232
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,915,000	0	0	0	0	1	2,915,000
LCD Projector/Infocus	Buah	2	18,500,000	0	0	0	0	2	18,500,000
Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	1,139,208	0	0	0	0	1	1,139,208
Meja Kerja Kayu	Buah	117	121,415,479	0	0	0	0	117	121,415,479
Kursi Besi/Metal	Buah	53	43,959,928	0	0	0	0	53	43,959,928
Kursi Kayu	Buah	330	393,076,110	0	0	0	0	330	393,076,110
Sice	Buah	2	5,178,416	0	0	0	0	2	5,178,416
Meja Rapat	Buah	3	5,630,286	0	0	0	0	3	5,630,286
Tempat Tidur Kayu	Buah	168	884,042,168	0	0	0	0	168	884,042,168
Meja Makan Kayu	Buah	84	133,361,037	0	0	0	0	84	133,361,037
Sofa	set	124	255,023,222	0	0	0	0	124	255,023,222
Meubelair Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemari Es	Buah	1	2,188,708	0	0	0	0	1	2,188,708
A.C. Split	Buah	80	446,413,664	0	0	0	0	80	446,413,664
Televisi	Buah	2	13,877,916	0	0	0	0	2	13,877,916
Dispenser	Buah	1	1,138,708	0	0	0	0	1	1,138,708
Tempat Sampah	Buah	0	0	1	529,208	0	0	1	529,208
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	529,208	0	0	1	529,208	0	0
Rak Peralatan	Buah	2	2,128,159	0	0	0	0	2	2,128,159
Camera Digital	Buah	3	31,855,000	0	0	0	0	3	31,855,000
Video Conference	Buah	1	52,000,000	0	0	0	0	1	52,000,000
Drone	Buah	3	84,975,000	0	0	0	0	3	84,975,000
GPS Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamera Udara	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
Alat Studio Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
Facsimile	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	dummy	1	6,875,000	0	0	0	0	1	6,875,000
Serial Scanner/Printer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
P.C Unit	Buah	9	94,163,108	0	0	0	0	9	94,163,108
Lap Top	Buah	0	0	1	72,500,000	0	0	1	72,500,000
Note Book	Buah	21	358,655,550	0	0	1	72,500,000	20	286,155,550
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	58,467,124	0	0	0	0	13	58,467,124
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	16,000,000	0	0	0	0	3	16,000,000
Gedung dan Bangunan		3	49,966,411,907	1	964,496,700	1	964,496,700	3	49,966,411,907
Taman Permanen	Unit	1	162,380,000	0	0	0	0	1	162,380,000
Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	49,804,031,907	1	964,496,700	1	964,496,700	2	49,804,031,907
Rumah Sederhana Sehat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumah Khusus	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalan dan Jembatan		0	0	502	198,405,000	0	0	502	198,405,000
Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0	502	198,405,000	0	0	502	198,405,000
Jalan Khusus Lainnya	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0	0

Sub-sub Kelompok Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2023		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai	Bertambah		Berkurang		Kuantitas	Nilai
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
Alat Studio Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumah Khusus	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			53,739,004,496		1,235,930,908		1,235,930,908		53,739,004,496

Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Sub-sub Kelompok Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2023		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai	Bertambah		Berkurang		Kuantitas	Nilai
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Peralatan dan Mesin		738	1,445,144,400	16	289,011,600	16	289,011,600	738	1,445,144,400
Memori Programmer	Buah	1	638,000	0	0	0	0	1	638,000
Lemari Besi/Metal	Buah	5	16,314,600	0	0	0	0	5	16,314,600
Lemari Kayu	Buah	155	201,605,288	0	0	0	0	155	201,605,288
Rak Besi	Buah	1	3,628,900	0	0	0	0	1	3,628,900
Brandkas	Buah	1	5,390,000	0	0	0	0	1	5,390,000
Laci Box	Buah	1	2,365,000	0	0	0	0	1	2,365,000
CCTV - Camera Control Television System	Buah	7	10,500,000	0	0	0	0	7	10,500,000
LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,930,000	0	0	0	0	1	6,930,000
Meja Kerja Kayu	Buah	173	160,066,928	0	0	0	0	173	160,066,928
Kursi Besi/Metal	Buah	32	40,453,600	0	0	0	0	32	40,453,600
Kursi Kayu	Buah	144	83,305,008	0	0	0	0	144	83,305,008
Meja Rapat	Buah	3	6,902,500	0	0	0	0	3	6,902,500
Tempat Tidur Kayu	Buah	144	297,026,976	0	0	0	0	144	297,026,976
Sofa	set	5	21,775,900	0	0	0	0	5	21,775,900
Meubelair Lainnya	dummy	1	4,950,000	0	0	0	0	1	4,950,000
Kipas Angin	Buah	1	499,000	0	0	0	0	1	499,000
Televisi	Buah	3	18,950,100	0	0	0	0	3	18,950,100
Camera Digital	Buah	2	43,755,000	0	0	0	0	2	43,755,000
Camera Conference	Buah	1	17,000,000	0	0	0	0	1	17,000,000
Drone	Buah	0	0	2	63,752,700	0	0	2	63,752,700
GPS Receiver	Buah	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
Alat Studio Lainnya	dummy	3	69,752,700	0	0	2	63,752,700	1	6,000,000
Facsimile	Buah	1	2,475,000	0	0	0	0	1	2,475,000
P.C Unit	Buah	16	145,760,000	0	0	0	0	16	145,760,000
Lap Top	Buah	0	0	14	225,258,900	0	0	14	225,258,900
Note Book	Buah	14	225,258,900	0	0	14	225,258,900	0	0
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20	53,241,000	0	0	0	0	20	53,241,000
External/ Portable Hardisk	Buah	2	2,100,000	0	0	0	0	2	2,100,000
Gedung dan Bangunan		2	10,435,960,000	0	2,550,000	0	0	2	10,438,510,000
Taman Permanen	Unit	1	549,450,000	0	2,550,000	0	0	1	552,000,000
Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1	9,886,510,000	0	0	0	0	1	9,886,510,000
TOTAL			11,881,104,400		291,561,600		289,011,600		11,883,654,400

Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Sub-sub Kelompok Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2023		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai	Bertambah		Berkurang		Kuantitas	Nilai
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Peralatan dan Mesin		1,907	5,052,993,652	550	16,447,820,176	10	1,997,356,758	2,447	19,503,457,070
Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
Lemari Kayu	Buah	440	1,386,642,888	120	13,156,671,900	0	0	560	14,543,314,788
Rak Kayu	Buah	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
Brandkas	Buah	1	4,950,000	0	0	0	0	1	4,950,000
CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,425,000	0	0	0	0	1	7,425,000
Meja Kerja Kayu	Buah	476	650,710,470	60	50,109,000	0	0	536	700,819,470
Kursi Besi/Metal	Buah	20	24,860,000	0	0	0	0	20	24,860,000
Kursi Kayu	Buah	466	586,100,766	120	132,615,000	0	0	586	718,715,766
Tempat Tidur Kayu	Buah	440	1,766,179,528	120	867,452,818	0	0	560	2,633,632,346
Meja Makan Kayu	Buah	0	0	60	77,406,000	0	0	60	77,406,000
Sofa	set	0	0	60	166,208,700	0	0	60	166,208,700
Meubelair Lainnya	dummy	0	0	1	1,741,406,758	1	1,741,406,758	0	0
Televisi	Buah	2	15,680,000	0	0	0	0	2	15,680,000
Camera Electronic	Buah	1	26,950,000	0	0	1	26,950,000	0	0
Camera Digital	Buah	1	10,000,000	1	36,250,000	0	0	2	46,250,000
Camera Conference	Buah	0	0	1	26,950,000	0	0	1	26,950,000
Drone	Buah	0	0	2	59,300,000	0	0	2	59,300,000
Alat Tulis Gambar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamera Udara	Buah	2	59,300,000	0	0	2	59,300,000	0	0
Facsimile	Buah	1	1,485,000	0	0	0	0	1	1,485,000
Kamera Digital	Buah	1	36,250,000	0	0	1	36,250,000	0	0
P.C Unit	Buah	16	164,325,000	2	30,150,000	0	0	18	194,475,000
Lap Top	Buah	10	110,075,000	3	103,300,000	0	0	13	213,375,000
Note Book	Buah	3	103,300,000	0	0	3	103,300,000	0	0
Personal Komputer Lainnya	dummy	2	30,150,000	0	0	2	30,150,000	0	0
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	47,860,000	0	0	0	0	19	47,860,000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan		1	5,648,097,600	1	26,728,094,100	0	0	2	32,376,191,700
Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1	5,648,097,600	1	26,728,094,100	0	0	2	32,376,191,700
TOTAL			10,701,091,252		43,175,914,276		1,997,356,758		51,879,648,770

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:

- a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III
Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
Pagu awal yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.07.1.420146/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 8.171.571.000, dan pagu akhir sesuai revisi 16 yaitu sebesar Rp. 8.866.901.000.
- b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
Pagu awal yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.07.1.401655/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 199.708.495.000, dan pagu akhir sesuai revisi 16 yaitu sebesar Rp. 196.112.573.000.
- c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
Pagu awal yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.07.1.401652/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 117.628.157.000, dan pagu akhir sesuai revisi 13 yaitu sebesar Rp. 129.577.454.000.
- d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
Pagu awal yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.07.1.401653/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 70.240.104.000, dan pagu akhir sesuai revisi 11 yaitu sebesar Rp. 140.504.275.000.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420146/2023**



05 2023-0476-0340-0239

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini dibagikan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Dijan Penumahan
3. Provinsi	:	(09)	RIAU
4. Kode/Nama Sakter	:	(420146)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III
Sebesar	:	Rp. 8.171.571.000	(DELAPAN MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Unit kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Terlampir			Terlampir	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :						
1. Rupiah Murni	Rp.	8.171.571.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.		0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.		0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.		0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.		0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.		0
			6. SBSN PBS	Rp.		0
D. Pencanaan dana dilakukan melalui :						
1. KPPN PEKANBARU		(008) Rp.	8.171.571.000			

E. Pernyataan Syntetis dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakler dan pencnaan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasua Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasua Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/
ISA RACHMATARWATA
NP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420146/2023**



05 4107-6300-0308-2043

Revisi ke 16
Tanggal : 19 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini dibagikan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Dijan Penumahan
3. Provinsi	:	(09)	RIAU
4. Kode/Nama Sakter	:	(420146)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III
Sebesar	:	Rp. 8.866.901.000	(DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SATU RIBU RUPIAH)

Unit kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Terlampir			Terlampir	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :						
1. Rupiah Murni	Rp.	8.866.901.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.		0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.		0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.		0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.		0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.		0
			6. SBSN PBS	Rp.		0
D. Pencanaan dana dilakukan melalui :						
1. KPPN PEKANBARU		(008) Rp.	8.866.901.000			

E. Pernyataan Syntetis dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakler dan pencnaan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasua Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasua Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/
ISA RACHMATARWATA
NP. 196612301991021001

Gambar 3.17. DIPA petikan awal dan revisi akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DS.0066-5560-6052-0058

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401655/2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (07) | Ditjen Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (08) | SUMATERA BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (401655) | PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 199.708.495.000 | (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	199.708.495.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN P A D A N G | (010) Rp. | 199.708.495.000 |
|---------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DS.1870-0009-8330-6400

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401655/2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (07) | Ditjen Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (08) | SUMATERA BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (401655) | PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 196.112.573.000 | (SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR SERATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	196.112.573.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN P A D A N G | (010) Rp. | 196.112.573.000 |
|---------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Gambar 3.18. DIPA petikan awal dan revisi akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401652/2023**



DS-3278-0070-7568-6912

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (07) | Ditjen Perumahan |
| 3. Provinsi | : (09) | RIAU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (401652) | PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU |
| Sebesar | : Rp. 117.628.157.000 | (SERATUS TUJUH BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	117.628.157.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN PEKANBARU (008) Rp. 117.628.157.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401652/2023**



DS-4481-2079-2762-7044

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (07) | Ditjen Perumahan |
| 3. Provinsi | : (09) | RIAU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (401652) | PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU |
| Sebesar | : Rp. 129.577.454.000 | (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	129.577.454.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN PEKANBARU (008) Rp. 129.577.454.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Gambar 3.19. DIPA petikan awal dan revisi akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401653/2023**

DS.8059-2030-8099-9592

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	:	(401653)	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sebesar	:	Rp. 70.240.104.000	(TUJUH PULUH MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	70.240.104.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG	(009) Rp.	70.240.104.000
------------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANItd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.401653/2023**

DS.0868-2606-2600-1259

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	:	(401653)	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sebesar	:	Rp. 140.504.275.000	(SERATUS EMPAT PULUH MILIAR LIMA RATUS EMPAT JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	140.504.275.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG	(009) Rp.	140.504.275.000
------------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANItd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Gambar 3.20. DIPA petikan awal dan revisi akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023

Pagu anggaran yang dimiliki oleh balai dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III digunakan dalam rangka mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen dengan rincian output berdasarkan DIPA awal tahun 2023 sebagai berikut:

a. Rincian Output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023

Tabel 3.9 Rincian output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berdasarkan DIPA awal tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			4.637.581.000
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		4.637.581.000
4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6 Rekomendasi Kebijakan	4.637.581.000
4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.782.456.000
4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1 Rekomendasi Kebijakan	704.125.000
4978.ABF.014	Klinik Rumah Swadaya	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1 Rekomendasi Kebijakan	95.000.000
4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1 Rekomendasi Kebijakan	266.000.000
Program Dukungan Manajemen			3.533.990.000
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		3.533.990.000
5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	3.333.990.000
5578.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	125.000.000
5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.208.990.000
5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	200.000.000
5578.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	200.000.000

b. Rincian Output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 3.10 Rincian output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan DIPA awal tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			198.794.257.000
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		198.794.257.000
4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	215 unit	67.976.528.000
4978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	215 unit	67.976.528.000
4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	269 unit	6.269.789.000
4978.CDB.005	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	269 unit	6.269.789.000
4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	4.894 unit	124.277.985.000
4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	100 unit	1.150.000.000
4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	44 unit	21.498.810.000
4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	4.750 unit	101.629.175.000
Program Dukungan Manajemen			914.238.000
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		914.238.000
5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	914.238.000
5578.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	100.000.000
5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	814.238.000

c. Rincian output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Tahun 2023

Tabel 3.11 Rincian output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan DIPA awal tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			116.902.617.000
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		116.902.617.000
4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	56 unit	27.151.630.000
4978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	56 unit	27.151.630.000
4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	4.350 unit	89.481.032.000
4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	350 unit	4.025.000.000
4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	4.000 unit	85.456.032.000
Program Dukungan Manajemen			725.540.000
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		725.540.000
5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	725.540.000
5578.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	100.000.000
5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	625.540.000

d. Rincian output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Tabel 3.12 Rincian output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan DIPA awal tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			69.563.872.000
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		69.563.872.000
4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	269.955.000
4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1 unit	1.207.000.000
4978.CDB.002	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun MBR/Pekerja	1 unit	1.207.000.000
4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.210 unit	68.086.917.000
4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	150 unit	1.725.000.000
4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	60 unit	23.053.450.000
4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2.000 unit	43.308.467.000
Program Dukungan Manajemen			676.232.000
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		676.232.000
5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	676.232.000
5578.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	75.000.000
5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	601.232.000

Terdapat perbedaan rincian tahun 2023 yang tercatat pada dokumen Rencana Strategis dengan dokumen DIPABalai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III yaitu pada target output, nomenklatur, maupun jumlah anggaran karena adanya penyesuaian yang dilaksanakan seiring berjalannya kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rincian output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 berdasarkan Renstra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET 2023	ANGGARAN (RP RIBU)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			778.540.540
Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			778.540.540
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3 Laporan	2.951.720
2	Pembangunan PSU Rumah MBR	3.500 unit	51.628.010
3	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya	9.510 unit	370.281.000
4	Pembangunan Rumah Khusus	120 unit	27.960.000
5	Pembangunan Rumah Susun	1.018 unit	325.719.810
Program Dukungan Manajemen			6.497.440
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			6.497.440
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 layanan	199.110
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 layanan	889.010
3	Layanan Perkantoran	3 layanan	5.409.320

BAB 4



AKUNTABILITAS KINERJA



4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan dengan *output* sebagai capaian terhadap dua sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan. Kegiatan tersebut diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang pelaksanaannya mencakup balai dan tiga wilayah satuan kerja yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023.

Kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dilaksanakan dalam rangka mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni; dan
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Berikut ini merupakan capaian kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) revisi terakhir tahun 2023.

Tabel 4.1 *Capaian kinerja utama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023*

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target PK 2023	Realisasi 2023	Capaian
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 laporan	6 laporan	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 unit	10.604 unit	99,66%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 unit	371 unit	100%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 tower	17 tower	100%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	100 unit	100 unit	100%
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	75 unit	75 unit	100%
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 unit	2.547 unit	128,96%
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 laporan	2 laporan	100%
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 layanan	4 layanan	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 layanan	4 layanan	100%

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 secara umum telah memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Namun masih ada kegiatan yang belum memenuhi target kinerja, yaitu pada pelaksanaan kegiatan rumah swadaya dengan capaian sebesar 99,66%.

4.1.1 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

Berikut rincian kegiatan perencanaan penyediaan perumahan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023. Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan

1.1 Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Dalam proses pengusulan bantuan bidang perumahan di setiap daerah perlu koordinasi yang baik antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan sinkronisasi program pusat-daerah diperlukan dalam penyusunan program pembangunan khusus di bidang perumahan agar alokasi anggaran termanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk terwujudnya penggunaan anggaran secara

efektif dan efisien baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mengadakan **Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat-Daerah Tahun 2023 Tahap I** untuk mensinkronkan usulan bantuan infrastruktur perumahan pada masing-masing daerah di tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan pembangunan perumahan, baik kegiatan maupun anggaran pada wilayah kerja balai tahun 2023. Tujuan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat-Daerah Tahun 2023 yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman terkait perencanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tahun 2020-2024;
- b. Meningkatkan strategi penyusunan pemrograman dan penganggaran kegiatan perumahan tahun anggaran 2024 melalui tahapan awal koordinasi dan sinkronisasi antara Pusat dan Daerah; dan
- c. Menjaring kebutuhan penanganan dan anggaran pembangunan perumahan di daerah sesuai Prioritas Nasional melalui pengusulan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat-Daerah Tahun 2023 Tahap I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan sinkronisasi program Pusat-Daerah tahun 2023 Tahap I

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat-Daerah Tahun 2023 Tahap I	<p>a. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, 3 s.d 5 April 2023 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau secara <i>offline</i> dan <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i>.</p> <p>b. Kegiatan diikuti oleh peserta perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, Bappeda Kabupaten Karimun, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.</p> <p>c. Prioritas penganggaran Direktorat Jenderal Perumahan TA 2024, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan program di 21 kawasan prioritas (<i>quick wins</i>) • Pelaksanaan kegiatan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan termasuk kegiatan OPOR TA 2024 • Pembangunan perumahan melalui kegiatan padat karya, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting • Penyediaan hunian untuk ASN di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) • Penyediaan perumahan pada kawasan 3T dan terdampak bencana • Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan direktif Presiden dan direktif Menteri PUPR </p> <p>d. Prioritas program pembangunan Rumah Susun TA 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan MYC terkait rumah susun TA 2022-2023 • Pelaksanaan pekerjaan diskresi Presiden dan direktif Menteri PUPR • Kegiatan pembangunan rumah susun aspirasi • Kegiatan kolaboratif antar Kementerian dan Internal PUPR dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh • Kegiatan OPOR 2023 untuk rumah susun terbangun dalam rangka mendorong percepatan serah terima aset rumah susun </p> <p>e. Prioritas pembangunan rumah khusus TA 2023-2024, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • OPOR dalam rangka percepatan penghunian dan serah terima aset (prioritas TA 2015-2021) • Penyediaan rumah jabatan setingkat menteri di kawasan IKN • Kegiatan direktif Presiden • Pembangunan huntap pasca bencana </p> <p>f. Prioritas kegiatan rumah umum dan komersial TA 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan PSU • NSPK • Program Sejuta Rumah (PSR) • Inisiasi program baru melalui <i>pilot project</i> program bantuan RITTA melalui dukungan CSR • Fasilitasi bidang RUK </p> <p>g. Fokus penanganan rumah swadaya tahun 2023-2024, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas RTLH • Penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi • Perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya </p> <p>h. Verifikasi administrasi usulan bantuan pembangunan infrastruktur perumahan telah disesuaikan dengan <i>Readiness Criteria</i> dari masing-masing program perumahan, sehingga hampir seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melakukan upaya perbaikan, melengkapi dan merevisi dokumen usulan agar sesuai dengan format yang ditetapkan.</p> <p>i. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pembuatan usulan dan diupload pada aplikasi SIBARU agar administrasi usulan sesuai <i>Readiness Criteria</i> yang ditetapkan.</p>

Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program pusat-daerah ini tidak terlepas dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah/pengusul belum sepenuhnya memahami *Readiness Criteria* usulan yang telah ditetapkan;
- b. Dokumen administrasi kelengkapan usulan yang telah diajukan melalui aplikasi SIBARU belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Permen PUPR No. 7 Tahun 2022.

Berikut dokumentasi kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat-Daerah Tahun 2023 Tahap I:



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga mengadakan sinkronisasi Pusat-Daerah Tahap II dalam kegiatan **Sinkronisasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan** untuk mensinkronkan usulan bantuan infrastruktur perumahan pada masing-masing daerah di tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan dalam menyusun rencana awal kebutuhan kegiatan dan anggaran TA 2025, serta pengendalian kegiatan penyelenggaraan perumahan oleh *stakeholder* yang berlangsung di daerahnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi program pusat-daerah tahap II adalah:

- a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan strategi penyelenggaraan perumahan tahun 2025-2029;
- b. Mempersiapkan strategi penyusunan pemrograman dan penganggaran kegiatan perumahan TA 2025 melalui tahapan awal koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah;
- c. Menjaring usulan awal rencana penyelenggaraan perumahan sesuai Prioritas Nasional melalui pengusulan kegiatan oleh Pemda secara efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan kualitas *output* dan *outcome* perencanaan serta pengendalian yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi dalam hal koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan pelaporan;
- e. Mengidentifikasi pemanfaatan/penghunian aset oleh pemerintah daerah.

Uraian kegiatan Sinkronisasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kegiatan Sinkronisasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Sinkronisasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau secara <i>offline</i> dan <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i>. b. Kegiatan diikuti oleh peserta perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi pengembang perumahan, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. c. Prioritas program pembangunan Rumah Susun TA 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan MYC terkait rumah susun TA 2022-2023 • Pelaksanaan pekerjaan diskresi Presiden dan direktif Menteri PUPR • Kegiatan pembangunan rumah susun aspirasi • Kegiatan kolaboratif antar Kementerian dan Internal PUPR dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh • Kegiatan OPOR 2023 untuk rumah susun terbangun dalam rangka mendorong percepatan serah terima aset rumah susun <p>Capaian pembangunan rumah susun TA 2022 sebanyak 11.902 unit dari total target 51.340 unit pada periode 2020-2024.</p> d. Pelaksanaan kegiatan rumah umum dan komersial menggunakan acuan Permen PUPR No. 7 tahun 2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No. 09/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSU. e. Pelaksanaan kegiatan rumah swadaya TA 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • BSPS (PKE dan pengentasan RTLH) • Dukungan BSPS untuk ASEAN Summit 2023 • Klinik Rumah Swadaya • Magang bersertifikat bidang rumah swadaya 2023

Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi arah dan kebijakan pembangunan perumahan ini tidak terlepas dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah/pengusul belum sepenuhnya memahami arah dan kebijakan pembangunan perumahan yang telah ditetapkan;
- b. Pemerintah Daerah/pengusul belum sepenuhnya memahami *Readiness Criteria* usulan yang telah ditetapkan.



Rapat Sinkronisasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan

1.2 Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2023 diarahkan pada tiga komponen kegiatan utama, yaitu fasilitasi penguatan kemandirian Pokja PKP, fasilitasi penyusunan RP3KP dan fasilitasi basis data PKP. Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 di bidang perumahan, Pemda bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang dibantu staf pendukung baik kelembagaan, pendataan dan perencanaan diharapkan mampu menggali potensi yang ada melalui kolaborasi sektor untuk mendorong pengarusutamaan Pokja PKP yang ada baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menyelenggarakan **Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023**. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendorong dan membangun kesepahaman bersama terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP tahun 2023 dengan tujuan sebagai berikut:

- Terlaksananya kegiatan Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menguatkan, mewujudkan, dan menyelenggarakan sektor perumahan yang lebih baik, efisien, dan efektif;
- Terlaksananya kerjasama berbagai perencanaan, kebijakan, program, dan kegiatan dari berbagai sektor terkait menjadi sebuah komitmen bersama untuk saling mendukung dan bersinergi;
- Dapat mengidentifikasi potensi pendataan perumahan provinsi dan kabupaten/kota;
- Untuk dapat mengelola sistem informasi basis data PKP.

Rincian Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian kegiatan Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kegiatan	Keterangan
1	Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu s.d Kamis, 18 s.d 19 Oktober 2023 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau secara <i>offline</i> dan <i>online</i> (<i>zoom meeting</i>). Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, BKKBN Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. Peran data dalam siklus pembangunan daerah yaitu sebagai analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah, penetapan indikator pembangunan, dan evaluasi hasil pencapaian pembangunan. Strategi peningkatan peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan pendataan, yaitu penguatan kapasitas staf Dinas PKP, pengalokasian anggaran pendataan, melakukan sinergi dalam pendataan, penyelenggaraan forum data PKP secara berkala, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga (pendukung) pendataan PKP, penyelenggaraan pusat data dan layanan informasi PKP (klinik perumahan) di daerah. Evaluasi capaian kerja Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat: <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya pendanaan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber dana untuk pembiayaan PKP di daerah Perlu sinkronisasi dan update data rumah BNBA antara pusat dan daerah Perlu peningkatan koordinasi dan harmonisasi internal Pokja PKP Perlu peningkatan peran Forum PKP mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi urusan PKP Rencana kerja Pokja PKP Provinsi Riau tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> Review dokumen RP3KP Provinsi Riau Pendampingan penyusunan dokumen SSK Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu Lanjutan pembangunan SPAM Durolis Bimbingan teknis penyediaan air minum dan sanitasi Provinsi Riau BKK rumah layak huni Provinsi Riau tahun 2023 (707 unit) Penyediaan rumah korban bencana Provinsi Riau tahun 2023 (83 unit) Tindak lanjut review kinerja Pokja PKP Provinsi Kepulauan Riau <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan update berkala keaktifan dan kemandirian Pokja PKP dan Forum PKP provinsi dan kabupaten/kota Pokja PKP dan Forum PKP telah menyusun program kerja 1-5 tahun kedepan Pokja PKP berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi penyelenggaraan PKP dengan lembaga non pemerintah Pokja PKP berperan aktif dalam mendorong pengarusutamaan penyelenggaraan PKP dalam ketersediaan APBD Pemimpin daerah dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan PKP melalui penyusunan regulasi dan penetapan anggaran penyelenggaraan PKP.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini tidak terlepas dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam menyediakan basis data perumahan yang komprehensif;
- b. Keterbatasan dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP;
- c. Kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan atau sumber data terkait bidang PKP.

Berikut dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.



Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 hari pertama 18 Oktober 2023



Rapat Koordinasi I: Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 hari pertama 19 Oktober 2023

Rapat Koordinasi II: Finalisasi Basis Data PKP Provinsi Kabupaten/Kota dan Review Kinerja Pokja PKP dan Forum PKP Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau batal dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan yang berdampak pada alokasi anggaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. Dalam hal pendampingan penyelenggaraan PKP yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, salah satu hasil yang diharapkan adalah kemandirian Pokja PKP dan Forum PKP serta tersusunnya dokumen RP3KP di daerah wilayah kerja balai.

Pokja PKP merupakan wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP. Berikut ini status efektivitas penyelenggaraan Pokja PKP provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III:

Tabel 4.5 Status efektivitas penyelenggaraan Pokja PKP

No	Provinsi	Keterangan
1	Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan SK Pokja PKP b. Sebanyak 19 kabupaten/kota telah memiliki SK Pokja PKP c. Dari total 19 kabupaten/kota, hanya 13 kabupaten/kota yang telah merealisasikan SK Forum PKP
2	Riau	d. Provinsi Riau telah merealisasikan SK Pokja PKP e. Sebanyak 12 kabupaten/kota telah merealisasikan SK Pokja PKP f. Sebanyak 3 kabupaten/kota telah membentuk Forum PKP yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis
3	Kepulauan Riau	g. Pokja PKP Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan SK Pokja PKP h. Sebanyak 4 kabupaten/kota telah membentuk Forum PKP yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna. i. Sebanyak 7 kabupaten/kota telah memiliki SK Pokja PKP sesuai Permen PUPR no. 12 tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi terkait Pokja PKP dan Forum PKP yaitu:

- Masih minimnya koordinasi yang dilakukan Forum PKP.
- Masih terdapat kabupaten/kota yang belum merealisasikan SK Pokja PKP atau Forum PKP. Kegiatan advokasi dan koordinasi sebaiknya dilakukan di beberapa daerah kabupaten/kota, namun perlu penyesuaian waktu pelaksanaan pendampingan, sehingga daerah yang dipilih adalah daerah yang dalam masa penyusunan dokumen RP3KP.
- Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan advokasi dan koordinasi ke kabupaten/kota terkait dukungan Pokja PKP dan Forum PKP.
- Kurangnya keaktifan anggota Pokja PKP sehingga sulit melaksanakan rapat rutin.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut ini status penyusunan dokumen RP3KP di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III:

Tabel 4.6 Status penyusunan dokumen RP3KP

No	Provinsi	Keterangan
1	Sumatera Barat	a. Sebanyak 16 kabupaten/kota telah menyusun RP3KP yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Pasaman Barat. b. Sebanyak 2 kabupaten/kota masih belum menyusun dokumen RP3KP yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam. c. Kabupaten Pasaman tersisa penyusunan dokumen rencana.
2	Riau	d. Sebanyak 8 kabupaten/kota telah menyusun dokumen RP3KP, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti.
3	Kepulauan Riau	e. Sebanyak 4 kabupaten/kota telah menyusun dokumen RP3KP yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna.

Permasalahan yang dihadapi terkait penyusunan dokumen RP3KP yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan antusias Pemerintah Daerah terkait substansi RP3KP termasuk proses dan tahapan penyusunannya.
- b. Masih terdapat ego sektoral terkait kolaborasi data.
- c. Tidak tersedianya anggaran penyusunan RP3KP akibat adanya *refocussing* anggaran.
- d. Sulitnya mendapatkan data dalam proses penyusunan dokumen RP3KP.
- e. Kurangnya peran aktif Pokja PKP dalam penyediaan data.

1.3 Verifikasi dan Monev Penyelenggaraan Perumahan

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi menyangkut pemahaman dan penerapan proses dan atau hasil kegiatan yang telah dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dengan terlaksananya pemantauan dan evaluasi yang baik dan efisien akan menghasilkan pelaporan yang akurat sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun program kebijakan mendatang. Kegiatan ini tercapai melalui verifikasi teknis atas usulan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya TA 2023 serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU TA 2023. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dalam mencapai kinerja yang maksimal melalui monitoring dan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Melalui kegiatan kunjungan lapangan untuk melihat dan memantau secara langsung kondisi nyata di lapangan pada lokasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan PSU di seluruh wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III di tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Melalui kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi di wilayah kerja balai melalui **Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan BP2P Sumatera III** pada hari Rabu s.d Jumat, 23 s.d 25 Agustus 2023 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Melalui kegiatan Rapat Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III setiap minggu pada bulan Oktober s.d Desember 2023.
- d. Melalui kegiatan **Rapat Evaluasi Bantuan PSU TA 2023 dan Usulan Bantuan PSU TA 2024 Provinsi Sumatera Barat** pada hari Senin s.d Selasa, 4 s.d 5 Desember 2023 di Kota Padang dalam rangka pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan PSU TA 2024, koordinasi, persiapan serah terima aset dan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan bantuan PSU TA 2023.
- e. Melalui kegiatan **Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Barat** pada hari Selasa s.d Rabu, 5 s.d 6 Desember 2023 di Kota Padang dalam rangka pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2023.

Beberapa kendala yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yaitu:

- a. Keterlambatan proses lelang yang berakibat pada keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan.
- b. Proses pelaksanaan fisik terkendala ketersediaan alat, bahan dan material, jumlah tenaga kerja, serta masih terdampak kondisi cuaca.
- c. Lahan yang belum *clean and clear* sehingga perlu waktu lebih banyak untuk pematangan lahan.
- d. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sama persis dengan perencanaan sesuai *action plan*.
- e. Belum optimalnya ketersediaan basis data terkait kebutuhan perumahan.





Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Barat

4.1.2 Pelaksanaan Bantuan Perumahan

Secara umum pencapaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III merupakan hasil capaian terhadap pelaksanaan bantuan perumahan melalui empat kegiatan utama, yaitu Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Bantuan PSU bagi MBR. Berikut rincian kegiatan pelaksanaan bantuan perumahan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023.

1.1 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berikut ini capaian kinerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023.

Tabel 4.7 *Capaian Output Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya*

No	Output Kegiatan	Target PK 2023 (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian (%)
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya				
1	Provinsi Sumatera Barat	6.078	6.042	99,41
2	Provinsi Riau	3.062	3.062	100
3	Provinsi Kepulauan Riau	1.500	1.500	100
Total		10.640	10.604	99,66

Capaian kinerja BSPS yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu tercapai sebanyak 10.604 unit atau 99,66% dari total target 10.640 unit. Terdapat sebanyak 36 unit kegiatan BSPS tidak tercapai berada di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh adanya sengketa lahan.

Pelaksanaan kegiatan BSPS tahun 2023 dilaksanakan di tiga wilayah kerja balai yaitu:

- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan BSPS sebanyak 6.042 unit pada enam belas lokasi kabupaten/kota.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan BSPS sebanyak 3.062 unit pada dua belas lokasi kabupaten/kota.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan BSPS sebanyak 1.500 unit pada tujuh lokasi kabupaten/kota.

Tabel 4.8 *Pembangunan BSPS tahun 2023*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit
Provinsi Sumatera Barat					
1	Kabupaten Agam	635	9	Kabupaten Solok Selatan	160
2	Kabupaten Dharmasraya	187	10	Kabupaten Tanah Datar	92
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	403	11	Kota Padang	980
4	Kabupaten Padang Pariaman	74	12	Kota Padang Panjang	56
5	Kabupaten Pasaman	493	13	Kota Pariaman	76
6	Kabupaten Pasaman Barat	588	14	Kota Payakumbuh	41
7	Kabupaten Sijunjung	483	15	Kota Solok	126
8	Kabupaten Solok	677	16	Kabupaten Pesisir Selatan	971
Provinsi Riau					
1	Kabupaten Bengkalis	195	7	Kota Pekanbaru	290
2	Kabupaten Meranti	163	8	Kabupaten Indragiri Hilir	160
3	Kabupaten Rokan Hilir	380	9	Kabupaten Indragiri Hulu	145
4	Kabupaten Rokan Hulu	416	10	Kabupaten Kampar	721
5	Kabupaten Siak	215	11	Kabupaten Kuantan Singingi	100
6	Kota Dumai	213	12	Kabupaten Pelalawan	64
Provinsi Kepulauan Riau					
1	Kota Batam	811	5	Kabupaten Bintan	63
2	Kota Tanjungpinang	141	6	Kabupaten Natuna	70
3	Kabupaten Lingga	323	7	Kabupaten Kepulauan Anambas	50
4	Kabupaten Karimun	42			

Pelaksanaan kegiatan BSPS tahun 2023 tidak terlepas dari isu yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Belum optimalnya peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan;
- Jadwal penerbitan keputusan dari pusat terkait calon penerima bantuan mendekati akhir tahun pelaksanaan kegiatan;
- Pemahaman penerima bantuan yang masih terbatas terkait dengan pelaksanaan program BSPS baik dari segi konstruksi maupun biaya;
- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh tukang yang ditunjuk sehingga berdampak pada progres pelaksanaan fisik;
- Ketersediaan bahan atau material yang sering terlambat atau tidak sesuai dengan rencana sehingga berdampak pada progres pelaksanaan fisik.

1.2 Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun

Pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melaksanakan kegiatan rumah susun berupa pembangunan serta pemeliharaan dan perawatan. Berikut ini capaian kinerja pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.

Tabel 4.9 *Capaian Output Rumah Susun yang dibangun*

No	Output Kegiatan	Target PK 2023 (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian (%)
Jumlah Rumah Susun yang dibangun				
1	Provinsi Sumatera Barat	135	135	100
2	Provinsi Riau	141	141	100
3	Provinsi Kepulauan Riau	95	95	100
Total		371	371	100

Capaian kinerja pembangunan Rumah Susun yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu tercapai sesuai target sebesar 100%. Pembangunan Rumah Susun tahun 2023 di tiga wilayah kerja balai yaitu sebagai berikut:

- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pembangunan Rumah Susun pada tahun 2023 sebanyak empat tower.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau melaksanakan pembangunan Rumah Susun pada tahun 2023 sebanyak delapan tower.
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pembangunan Rumah Susun pada tahun 2023 sebanyak dua tower.

Tabel 4.10 *Pembangunan Rumah Susun tahun 2023*

No	Rumah Susun	Kabupaten/Kota	Jumlah Tower	Tipologi	Jumlah Unit
Provinsi Sumatera Barat					
1	Rumah Susun Universitas Dharmas Indonesia	Kabupaten Dharmasraya	1	Tipe 24	43 unit
2	Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Kota Padang	1	Tipe 36	39 unit
3	Rumah Susun Pondok Pesantren Thawalib	Kota Padang Panjang	1	Tipe Rembunai	6 barak
4	Rumah Susun Pondok Pesantren Al Manaar	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Tipe Rembunai	4 barak
Provinsi Riau					
1	Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Riau	Kota Pekanbaru	1	Tipe 24 pendek	43 unit
2	Rumah Susun Jabal Nur	Kabupaten Siak	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
3	Rumah Susun Nurul Huda	Kota Dumai	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
4	Rumah Susun Abuya Haji	Kabupaten Kampar	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
5	Rumah Susun Mualimin	Kabupaten Kampar	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
6	Rumah Susun Khalid bin Walid	Kabupaten Rokan Hulu	1	Tipe Barak Nuraga	4 barak
7	Rumah Susun Raudhatussalam	Kabupaten Rokan Hulu	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
8	Rumah Susun Ar-Rummani	Kabupaten Kampar	1	Tipe Barak Nuraga	14 unit
Provinsi Kepulauan Riau					
1	Rumah Susun STIT Hidayatullah	Kota Batam	1	Tipe Rembunai	4 barak
2	Rumah Susun Quran Center	Kota Tanjung Pinang	1	Tipe Nuraga	14 unit

Selain melaksanakan kegiatan pembangunan, pada tahun 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun dengan capaian output sebagai berikut:

Tabel 4.11 *Capaian Output Rumah Susun yang dipelihara*

No	Output Kegiatan	Target PK 2023 (Tower)	Realisasi (Tower)	Capaian (%)
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara				
1	Provinsi Sumatera Barat	8	8	100
2	Provinsi Riau	5	5	100
3	Provinsi Kepulauan Riau	4	4	100
Total		17	17	100

Pemeliharaan dan perawatan rumah susun dilaksanakan melalui kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) sebagai upaya mempercepat

penghunian dan menjaga kelayakan rumah susun yang telah selesai dibangun. Capaian kinerja pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu tercapai sesuai target sebesar 100%.

Tabel 4.12 Pemeliharaan Rumah Susun tahun 2023

No	Rumah Susun	Kabupaten/Kota	Jumlah Tower	Jenis Kontrak	Tipologi	Jumlah Unit
Provinsi Sumatera Barat						
1	Rumah Susun MBR Sungai Rumbai	Kabupaten Dharmasraya	1	Swakelola	Tipe 36	44 unit
2	Rumah Susun Pemkab Agam	Kabupaten Agam	1	Swakelola	Tipe 36	15 unit
3	Rumah Susun Akademi Komunitas Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar	1	Swakelola	Tipe 24	28 unit
4	Rumah Susun STIKIP / STIKES Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1	Swakelola	Tipe 24	28 unit
5	Rumah Susun PP Nurul Yakin	Kabupaten Padang Pariaman	1	Swakelola	Tipe Barak Panjang	12 unit
6	Rumah Susun Universitas Andalas	Kota Padang	1	Swakelola	Tipe 24	52 unit
7	Rumah Susun PP Darul Ulum	Kabupaten Pasaman	1	Swakelola	Tipe Barak Panjang	12 unit
8	Rumah Susun MBR Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1	Kontraktual	Tipe 36	42 unit
Provinsi Riau						
1	Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Universitas Lancang Kuning	Kota Pekanbaru	1	Swakelola	Tipe 21	98 unit
2	Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Huda Al Islami	Kabupaten Kampar	1	Swakelola	Tipe Barak Kecil	21 unit
3	Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun MBR Pelalawan	Kabupaten Pelalawan	1	Swakelola	Tipe 24	96 unit
4	Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Pondok Pesantren Al Majidiyah	Kabupaten Rokan Hilir	1	Swakelola	Tipe Barak Kecil	21 unit
5	Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun MBR Kuansing	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Swakelola	Tipe 36	42 unit
Provinsi Kepulauan Riau						
1	Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun BP Batam Tanjung Uncang Tower II	Kota Batam	1	Kontraktual	Tipe 24	90 unit
2	Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Batamec Tower C	Kota Batam	1	Swakelola	Tipe 24	80 unit
3	Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Batamec Tower D	Kota Batam	1	Swakelola	Tipe 24	80 unit
4	Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Universitas Internasional Batam	Kota Batam	1	Swakelola	Tipe 24	50 unit

Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kegiatan optimalisasi yang diperoleh sebagai Apresiasi Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun TA 2020-2022 melalui pemberian dukungan pekerjaan lanjutan menuju Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada kegiatan HAPERNAS 2023 “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan dan Terjangkau untuk Semua”. Dukungan ini diberikan terhadap Rumah Susun Pemkot Batam (Rusun Muka Kuning 2 Batamindo) dan Rumah Susun Asrama STT Real yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Rumah Susun tahun 2023 tidak terlepas dari isu yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Proses pelaksanaan fisik terkendala ketersediaan material, jumlah tenaga kerja, dan masih berdampak kondisi cuaca;
- Kedisiplinan penggunaan perlengkapan K3 masih kurang menjadi perhatian;
- Kelengkapan dokumen administrasi terlambat diproses;
- Manajemen waktu pelaksanaan fisik yang masih belum optimal dan kadang tidak sesuai *action plan* dalam upaya percepatan progres.

1.3 Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus

Pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melaksanakan kegiatan rumah khusus berupa pembangunan serta pemeliharaan dan perawatan. Berikut ini capaian kinerja penyelenggaraan rumah khusus yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.

Tabel 4.13 *Capaian Output Rumah Khusus yang dibangun dan dipelihara*

No	Output Kegiatan	Target PK 2023 (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian (%)
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun				
1	Provinsi Kepulauan Riau	100	100	100
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara				
2	Provinsi Sumatera Barat	75	75	100

Capaian kinerja pembangunan Rumah Khusus yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu tercapai sesuai target sebesar 100% dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 100 unit yaitu pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Longsor di Serasan, Kabupaten Natuna. Selain melaksanakan kegiatan pembangunan, pada tahun 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Rumah Khusus dengan output mencapai 100% sebanyak 75 unit berada di Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Rumah Khusus tahun 2023 tidak terlepas dari permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Proses pelaksanaan fisik terkendala ketersediaan alat dan material, jumlah tenaga kerja, dan masih terdampak kondisi cuaca;
- Kelengkapan dokumen administrasi terlambat diproses.

1.4 Fasilitasi Bantuan PSU bagi Rumah MBR

Dalam rangka menyediakan sarana, prasarana, dan utilitas bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan program bantuan PSU bagi Rumah MBR. Berikut ini capaian kinerja bantuan PSU bagi MBR yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023.

Tabel 4.14 *Capaian Output Bantuan PSU bagi Rumah MBR*

No	Output Kegiatan	Target PK 2023 (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian (%)
Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU				
1	Provinsi Sumatera Barat	650	853	131,23%
2	Provinsi Riau	450	598	132,89%
3	Provinsi Kepulauan Riau	875	1.096	125,26%
Total		1.975	2.547	128,96%

Capaian kinerja bantuan PSU bagi rumah MBR yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu tercapai sebanyak 2.547 unit atau 128,96% dari total target 1.975 unit. Fasilitasi bantuan PSU bagi rumah MBR tahun 2023 dilaksanakan di tiga wilayah kerja balai yaitu:

- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pembangunan PSU perumahan pada tahun 2023 sebanyak 853 unit pada sebelas lokasi perumahan.

- b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau melaksanakan pembangunan PSU perumahan pada tahun 2023 sebanyak 598 unit pada sembilan lokasi perumahan.
- c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pembangunan PSU perumahan pada tahun 2023 sebanyak 1.096 unit pada enam lokasi perumahan.

Tabel 4.15 *Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023*

No	Nama Perumahan	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Panjang Jalan (m)
Provinsi Sumatera Barat			853	
1	Perumahan Pesona Anai Lestari dan Pesona Anai Lestari 1	Kabupaten Padang Pariaman	85	297,5
2	Perumahan Pesona Anai Lestari 2 dan Pesona Anai Lestari 3	Kabupaten Padang Pariaman	50	175
3	Perumahan Palapa Saiyo V dan VI	Kabupaten Padang Pariaman	91	291,2
4	Perumahan 32 Alcindi Residence	Kabupaten Pasaman Barat	51	204
5	Perumahan Griya Hannah Asri Air Haji	Kabupaten Pesisir Selatan	66	264
6	Perumahan Griya Hannah Asri Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	50	175
7	Perumahan Bungo Pasang Asri	Kabupaten Pesisir Selatan	72	252
8	Perumahan Saiyo Asri Residence	Kota Solok	65	292,5
9	Perumahan Rangkiang Ventura Residence	Kabupaten Dharmasraya	102	408
10	Perumahan Ranah Tibarau	Kabupaten Dharmasraya	163	733,5
11	Perumahan D'Talago Green View	Kota Payakumbuh	58	174
Provinsi Riau			598	
	Perumahan Palm Madani	Kabupaten Pelalawan	62	279
	Perumahan Asadel Residence	Kabupaten Kuantan Singingi	52	229
	Perumahan Griya Teratai Indah	Kota Pekanbaru	50	229
	Perumahan Green Kubang Residence 3	Kabupaten Kampar	50	225
	Perumahan Alam Permai 10	Kabupaten Kampar	58	261
	Perumahan Andika Berkah Residence 4	Kabupaten Kampar	84	336
	Perumahan Griya Berkah Pelangi 2	Kabupaten Kampar	71	319,5
	Perumahan Cakrawala Nusantara Regency	Kabupaten Kuantan Singingi	71	319,5
	Perumahan Anak Rantau Residence	Kabupaten Rokan Hulu	100	450
Provinsi Kepulauan Riau			1.096	
	Perumahan Rhabayu Estuario	Kota Batam	180	
	Perumahan SP Land Marina	Kota Batam	205	
	Perumahan Graha Mentarau	Kota Batam	87	261
	Perumahan Dutama Paragon Residence	Kota Tanjungpinang	52	182
	Perumahan Permata Galaxy	Kota Tanjungpinang	431	1.508,5
	Perumahan Telaga Surya Regency	Kabupaten Bintan	141	493,5

Pelaksanaan kegiatan bantuan PSU bagi rumah MBR tahun 2023 tidak terlepas dari isu yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- a. Pemahaman penerima bantuan yang masih terbatas terkait dengan pelaksanaan bantuan PSU perumahan bagi MBR.
- b. Kelengkapan dokumen administrasi terlambat diproses.
- a. Proses pelaksanaan fisik terkendala ketersediaan alat, bahan dan material serta masih berdampak kondisi cuaca.

4.1.3 Serah Terima Aset

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan Serah Terima Aset sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah keputusan penghapusan terbit. Berikut ini pelaksanaan kegiatan Serah Terima Aset yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023.

Tabel 4.16 Serah Terima Aset Pembangunan Rumah Susun

NO	NAMA RUSUN / RUSUS / PSU	TAHUN PEROLEHAN	SATKER YANG MEMBANGUN	NOMOR, TAHUN DAN TGL BAST	NOMOR, TAHUN DAN TGL, SK PENGHAPUSAN
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU					
1	Rusun PP Riyadhul Ulum dan Meubelair	2020-2021	Satker PP Prov. Riau	195/BA/Dr/2023 001/YYS.TAU/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023	007/KPTS/SATKER PP-RIAU/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023
2	Rusun Pekerja Riau III	2018	Satker PP Prov. Riau	111/BA/Dr/2023 030/BKD-ASET/BAST/2023/03 Tanggal 20 Januari 2023	005.4/KPTS/SATKER PP-RIAU/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023
3	Rumah Susun Ponpes Syaafaaturrasul	2020-2021	Satker PP Prov. Riau	1360/BA/Dr/2023 038/PKS/45K/VII/2023 Tanggal 16 Juni 2023	008/KPTS/SATKER PP-RIAU/VII/2023 Tanggal 05 Juni 2023
4	Rusun Yayasan Darul Huda Al - Islami	2014	Satker Balai P2P Jawa I	1634/BA/Dr/2023 49/PPDH/RN/X/2023 Tanggal 11 Agustus 2023	91/KPTS/SATKER-BP2PJ-1/IX/2023 Tanggal 11 November 2023
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU					
1	Meubelair Rusun STISIPOL	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau	1193/BA/Dr/2023 007/YRHF/2023 Tanggal 05 Mei 2023	010/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 05 Juni 2023
2	Rusun Yayasan Vitka Politeknik Pariwisata Batam	2018	Satker Balai P2P Jawa I	1856/PKS/Dr/2023 135/SPK-KY/IX/2023 Tanggal 01 September 2023	72/KPTS/SATKER-BP2PJ-1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023
3	Meubelair Rusun STT Real	2022	Satker PP Prov. Kep. Riau	2075/BA/Dr/2023 011/AA/TU/YPRB/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	018/KPTS/PP-KEPRI/2023 31 Oktober 2023
4	Meubelair Rusun Universitas Internasional Batam (UIB)	2018	Satker PP Prov. Kep. Riau	2077/BA/DR/2023 023/YMTI-UIB/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	019/KPTS/PP-KEPRI/2023 31 Oktober 2023
5	Rumah Susun Universitas Internasional Batam (UIB)	2018	Satker PP Prov. Kep. Riau	2319BA/DR/2023 025/YMTI-BTM/XI/2023 Tanggal 29 November 2023	020/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 30 November 2023
6	Kabil Pantai Timur/ Otorita Batam	2015	Satker Balai P2P Jawa I	50/BA/Sj/2023 129/A/1/11/2023 Tanggal 29 November 2023	105/KPTS/SATKER-BP2PJ-1/IX/2023 Tanggal 13 Desember 2023
7	Otorita Batam	2015	Satker Balai P2P Jawa I		
8	Rusun Pekerja Tanjung Uncang Tower I dan II (Rusun PNS) / Rumah Susun BP Batam Tanjung Uncang Tower I dan II	2017	Satker Balai P2P Jawa I		
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT					
1	Rusun Ponpes Nurul Yaqin Al-Huffaz dan Meubelair	2021	Satker PP Prov. Sumatera Barat	785/BA/Dr/2023 D.03/PPNY-AH/BTK/IV-2023 Tanggal 03 April 2023	221/KPTS/SATKER.PNPR-SB/V-2023 Tanggal 22 Mei 2023
2	Rusun Universitas Andalas dan Meubelair	2018	Satker PP Prov. Sumatera Barat	1215/BA/Dr/2023 38/UN16.24.R/PL.03/2023 Tanggal 08 Mei 2023	239/KPTS/SATKER.PNPR-SB/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023
3	Rusun Poltek Payakumbuh	2014	Satker Balai P2P Jawa I	19/BA/Sj/2023 Tanggal 06 April 2023	34/KPTS/SATKER-BP2PJ-I/IV/2023 Tanggal 27 April 2023
4	Rusun ISI Padang Panjang	2018	Satker Balai P2P Jawa I	25//BA/SJ/2023 11582/AA2/LK.01.01/2023 Tanggal 10 Mei 2023	36/KPTS/SATKER-BP2PJ-1/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023
5	Rumah Susun Universitas Negeri Padang	2020-2021	Satker PP Prov. Sumatera Barat	2154/BA/Dr/2023 4972/UN35/TU/2023 Tanggal 22 Desember 2023	601/KPTS/SATKER.PNPR-SB/XII-2023 Tanggal 29 Desember 2023

Tabel 4.17 Serah Terima Aset Pembangunan Rumah Khusus

NO	NAMA RUSUN / RUSUS / PSU	TAHUN PEROLEHAN	SATKER YANG MEMBANGUN	NOMOR, TAHUN DAN TGL BAST	NOMOR, TAHUN DAN TGL, SK PENGHAPUSAN
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau					
1	Rumah Khusus WKDS	2018	Satker Balai P2P Jawa I	1025/BA/DR/2023 36/BPKAD-ASET/2023 Tanggal 31 Maret 2023	41/KPTS/SATKER-BP2P J-I/VI/2023 42/KPTS/SATKER-BP2P J-I/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023
2	TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	2015	Satker Balai P2P Jawa I	1582/BA/Dr/2023 Tanggal 13 Juli 2023	50.1/KPTS/SATKER-BP2PJ-I/VII /2023 Tanggal 21 Juli 2023
3	Rusus TNI AU-Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru	2016	Satker Balai P2P Jawa I		
4	Rumah Khusus Peruntukan Pahlawan Papua	2022	Satker PP Prov. Riau	2252/BA/DR/2023 Tanggal 20 November 2023	016/KPTS/SATKER PP-RIAU/XI/2023 Tanggal 27 November 2023
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau					
1	Rumah Khusus Kab. Anambas	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau	328/BA/DR/2023 113/BAST/KDH/2023 Tanggal 03 Februari 2023	008/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 17 April 2023
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat					
1	Rumah Khusus TNI AU	2015	Satker Balai P2P Jawa I	1582/BA/Dr/2023, Tanggal 13 Juli 2023	50.1/KPTS/SATKER-BP2PJ-I/VII /2023 Tanggal 21 Juli 2023
2	Rumah Khusus Peruntukan Atlet PODSI	2022	Satker PP Prov. Sumatera Barat	2251/BA/DR/2023 Tanggal 10 November 2023	564/KPTS/SATKER. P NPR-SB/XII/2023 07 Desember 2023
3	Rmah Khusus Pesisir Selatan A dan B	2018	Satker Balai P2P Jawa I	2322/BA/DR/2023 032/439/BPT-PS/XII/2023 Tanggal 30 November 2023	106/KPTS/SATKER-BP2PJ-1/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023

Tabel 4.18 Serah Terima Aset Pembangunan PSU

No	Nama Rusun / Rusus / PSU	Tahun Perolehan	Satker yang membangun	Nomor, Tahun dan Tgl BAST	Nomor, Tahun dan Tgl SK Penghapusan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau					
1	PSU Kab. Kampar	2021	Satker PP Prov. Riau	134/BA/Dr/2023 600/PERKIM/043 Tanggal 24 Januari 2023	004/KPTS/SATKER PP-RIAU/III/2023 Tanggal 06 Februari 2023
2	PSU Kab. Bengkalis	2021	Satker PP Prov. Riau	131/PKS/Dr/2023 600/DPPP-SEKR/2023/135 Tanggal 24 Januari 2023	005/KPTS/SATKER PP-RIAU/II/2023 Tanggal 06 Februari 2023
3	PSU Kab. Pelalawan	2021	Satker PP Prov. Riau	138/BA/Dr/2023 600/DPUPI/2023/16 Tanggal 24 Januari 2023	005.2/KPTS/SATKER PP-RIAU/II/2023 Tanggal 06 Februari 2023
4	PSU Kab. Siak	2021	Satker PP Prov. Riau	135/BA/Dr/2023 600/DPU-TARUKIM/2023/51.a Tanggal 24 Januari 2023	005.3/KPTS/SATKER PP-RIAU/II/2023 Tanggal 06 Februari 2023
5	PSU Kota Pekanbaru	2021	Satker PP Prov. Riau	130/BA/Dr/2023 P.Br/Perkim-PSU/12b/2023 Tanggal 24 Januari 2023	005.5/KPTS/SATKER PP-RIAU/II/2023 Tanggal 06 Februari 2023
6	PSU Kab. Kampar	2020	Satker Direktorat RUK	1328/BA/Dr/2023 600.1/Perkim-SET/1124 Tanggal 12 Juni 2023	Sedang proses penyusunan SK Penghapusan di Dit RUK
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau					
1	PSU Perumahan Bukit Indah Lestari 4	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau	1330/BA/Dr/2023 600/5.14.02/BA-BMN/2023 Tanggal 12 Juni 2023	013/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 20 Juli 2023
2	PSU Kota Batam	2013	Satker Direktorat RUK	977/BA/Dr/2023 111/900.1.11.1/III/2023 Tanggal 27 Februari 2023	38/SK/Satker.DRUK/2023 Tanggal 26 Mei 2023
3	PSU Kota Batam	2013	Satker Direktorat RUK		
4	PSU Kota Batam	2013	Satker Direktorat RUK		
5	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK		
6	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK		

No	Nama Rusun / Rusus / PSU	Tahun Perolehan	Satker yang membangun	Nomor, Tahun dan Tgl BAST	Nomor, Tahun dan Tgl SK Penghapusan
7	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK	977/BA/Dr/2023 111/900.1.11.1/III/2023 Tanggal 27 Februari 2023	38/SK/Satker.DRUK/2023 Tanggal 26 Mei 2023
8	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK		
9	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK		
10	PSU Kota Batam	2014	Satker Direktorat RUK		
11	PSU Perumahan Devely Residence	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau	1650/BA/Dr/2023 318.2/900.1.4.3/VIII/2023 Tanggal 31 Juli 2023	016/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 02 Oktober 2023
12	PSU Rhabayu Garden 2	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau		
13	PSU Perumahan Nagamas Residence	2021	Satker PP Prov. Kep. Riau	1327/BA/Dr/2023 600/773/DISPERKIM/2023 Tanggal 12 Juni 2023	017/KPTS/PP-KEPRI/2023 Tanggal 02 Oktober 2023
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat					
1	PSU Perumahan Graha Bunga Mas	2021	Satker PP Prov. Sumatera Barat	1085/BA/Dr/2023 600.2.9/3.69/prm. dperkim/2023 Tanggal 10 April 2023	243/SK/SATKER/PNP-SB/ VI-2023 Tanggal 08 Juni 2023
2	PSU Kab. Solok	2016	Satker Direktorat RUK	1530/BA/Dr/2022 032/986/Perkim/2022 Tanggal 16 November 2022	004/SK/Satker. DRUK/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023
3	PSU Kab. Solok	2019	Satker Direktorat RUK		
4	PSU Kota Padang	2020	Satker Direktorat RUK	535/BA/Dr/2023 000.4.32/I.59/D.Perkim- PRM/2023 Tanggal 20 Februari 2023	46/SK/SATKER. DRUK/2023 Tanggal 13 Juli 2023
5	PSU Kota Padang	2022	Satker PP Prov. Sumatera Barat	1971/BA/Dr/2023 000.2.3.2/5.34/D.Perkim- Prm/2023 Tanggal 17 Oktober 2023	531/SK/SATKER/PNP-SB/ XI/2023 21 November 2023

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan serah terima aset pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- Sulitnya penentuan jadwal penandatanganan BAST bersama bupati/walikota;
- Adanya kesalahan penulisan nama bupati/walikota yang tercantum di BAST sehingga perlu proses yang lebih lama akibat pengembalian BAST ke pusat;
- Masih terdapat aset pembangunan tahun lama (2005-2015) belum ditemukan;
- Dokumen kontrak pembangunan tahun lama (2005-2015) masih banyak yang belum ditemukan atau hilang;
- Pemerintah Daerah tidak mau menerima aset dalam kondisi rusak atau tidak sesuai dengan gambar rencana.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dalam kegiatan serah terima aset, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi bersama bupati/walikota terkait penentuan jadwal penandatanganan;
- Melakukan koordinasi dengan pusat terkait penulisan nama bupati/walikota yang tercantum di BAST, jika terdapat kesalahan, segera mengirimkan kembali kepada pusat untuk dicek dan diperbaiki;
- Melakukan koordinasi dengan pusat terkait lokasi aset pembangunan;
- Meminta Satuan Kerja yang melaksanakan pembangunan untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- Meminta Dinas terkait menyertakan surat pernyataan tidak bersedia menerima aset agar pusat dapat memproses penghapusan aset.

4.1.4 Capaian Kinerja Lainnya

1.1 Pembangunan Zona Integritas

Pemerintah perlu membangun upaya konkret dalam melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan Zona Integritas. Pelaksanaan Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja terutama yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efisien, dan transparan. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mendukung pembangunan Zona Integritas dengan menjadi pelaksana pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan balai dengan membentuk enam Pokja, yaitu Manajemen Perubahan, Penata Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III saat ini adalah dengan mengembangkan inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjawab ekspektasi pengguna layanan, baik internal unit maupun eksternal serta masyarakat luas melalui inovasi yang diterapkan, yaitu:

- a. Pemberian apresiasi *staff of the month*.
- b. Aplikasi Sistem Monitoring Akurasi Real Time, Terpadu dan Terintegrasi (SMART3).
- c. Podcast (Rapat Koordinasi dan Bincang Seru Berintegritas) terdiri dari dua kegiatan utama yaitu Morning Briefing dan Rapat Koordinasi:
Kegiatan Morning Briefing dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 WIB dengan agenda hari Senin, Selasa dan Kamis dilakukan *sharing session* dari masing-masing pegawai yang telah ditetapkan, pada hari Rabu dilakukan *games* bersama, dan hari Jumat dilakukan senam sehat setiap minggu pertama dan akhir setiap bulannya. Rapat Koordinasi terdiri dari Rapat Internal dan Rapat Percepatan Progres. Rapat Internal dilaksanakan setiap awal bulan diikuti seluruh pegawai. Rapat Percepatan Progres dilaksanakan setiap minggu selama Triwulan IV bersama dengan Satuan Kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.
- d. PA'CIK (Pelayanan dan Klinik Perumahan berbasis Chatbot yang informatif dan Komunikatif).

1.2 Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam rangka menjaga kredibilitas institusi dan meningkatkan kepercayaan publik serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (*fraud*), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berupaya menciptakan budaya kerja anti penyuapan dan telah mendapatkan sertifikasi dalam penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 27 Juli 2023.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para balai yang telah menerima sertifikat SMAP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menerima pemberian Sertifikat SMAP secara seremonial pada kegiatan Malam Puncak Hapernas 2023 di Jakarta, 31 Agustus 2023.

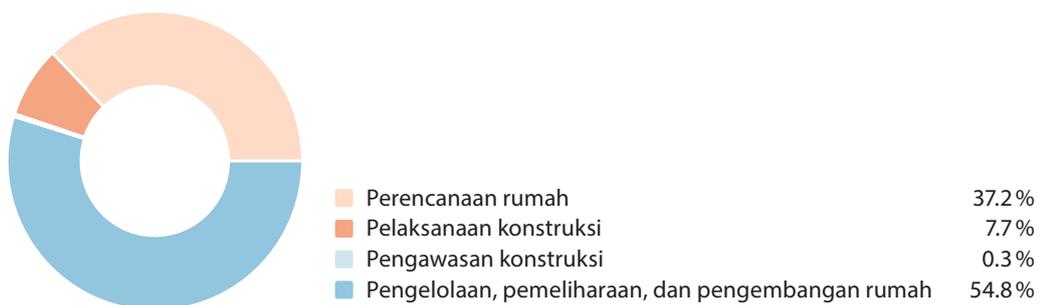


1.3 Klinik Rumah Swadaya

Klinik Rumah Swadaya (KRS) adalah kegiatan pemberian layanan informasi dan bantuan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III menyediakan layanan Klinik Rumah Swadaya. Lingkup layanan ini yaitu perencanaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan rumah.

- Perencanaan rumah mencakup layanan desain, penyusunan RAB, proses perizinan (PBG);
- Pelaksanaan konstruksi mencakup layanan pemilihan tukang, penentuan tukang;
- Pengawasan konstruksi mencakup pengawasan pembangunan/perbaikan rumah;
- Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan rumah.

Capaian layanan KRS yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 4.1. Persentase layanan KRS tahun 2023

Tabel 4.19 Capaian layanan Klinik Rumah Swadaya tahun 2023

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Perencanaan rumah	236
2	Pelaksanaan konstruksi	49
3	Pengawasan konstruksi	2
4	Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan rumah	348
	Total	635

Dalam upaya pencapaian layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) tahun 2023, Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Wilayah layanan yang luas sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan Klinik Rumah Swadaya.
- b. Masih terdapat aturan yang kurang jelas mengenai pelaksanaan Klinik Rumah Swadaya misalnya batasan tipe rumah yang dapat ditangani dan kriteria penerima layanan.
- c. Layanan melalui website yang kurang responsif.
- d. Kerjasama dengan stakeholder yang masih sulit dilakukan.



1.4 Aksi kolaborasi program BSPS dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka mendukung kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan aksi kolaborasi bersama instansi di luar Kementerian PUPR. Beberapa kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023, yaitu:

- a. Kolaborasi bersama BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memberi bantuan pada kegiatan BSPS-PKE berupa peningkatan kualitas sanitasi pada rumah sebanyak 25 penerima bantuan senilai 7,5

- juta rupiah pada Kabupaten Padang, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman.
- b. Kolaborasi bersama PT Semen Padang
 Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan PT Semen Padang melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Juli 2023 dilaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 114 zak semen untuk 57 rumah penerima bantuan di area Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Provinsi Sumatera Barat.
 - Penyerahan bantuan sebanyak 100 zak semen untuk 50 rumah penerima bantuan di area Kota Pekanbaru, serta bantuan 500 zak semen dalam rangka penanganan PKE di Desa Centai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- c. Kolaborasi bersama PT. Propan Raya ICC
 Pada bulan Februari tahun 2023 telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perumahan dengan PT Propan Raya ICC dan mendukung kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai berikut:
- Dukungan bantuan BSPS-PKE sebanyak 10 unit penerima bantuan di Provinsi Riau;
 - Dukungan bantuan PKE di desa Centai, Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.1.5 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya dalam merealisasikan komitmen pada Perjanjian Kinerja, pada tahun 2023 balai dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mendapatkan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perumahan sebesar Rp. 475.061.203.000 dengan pembagian pagu sebagai berikut:

- a. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Tabel 4.20 Realisasi keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.932.911	4.928.004	99,00	100,00
2 Program Dukungan Manajemen	3.933.990	3.907.668	99,90	100,00
Total	8.866.901	8.835.672	99,65	100,00

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.866.901.000. Adapun realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 8.835.672.000 atau 99,65% terhadap pagu anggaran dengan realisasi fisik telah mencapai 100%.

- b. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4.21 Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	194.978.355	193.573.893	99,28	95,05
2 Program Dukungan Manajemen	1.134.218	1.122.337	98,95	100,00
Total	196.112.573	194.696.230	99,28	95,08

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.112.573.000. Adapun realisasi anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 194.696.230.000 atau 99,28% terhadap pagu anggaran dengan realisasi fisik sebesar 95,08%.

- c. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Tabel 4.22 Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	128.422.100	128.348.680	99,94	99,84
2	Program Dukungan Manajemen	1.155.354	1.154.997	99,97	100,00
Total		129.577.454	129.503.677	99,94	99,85

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.577.454.000. Adapun realisasi anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 129.503.677.000 atau 99,94% terhadap pagu anggaran dengan realisasi fisik sebesar 99,85%.

- d. Realisasi Keuangan dan Fisik TA 2023 kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.23 Realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	139.154.052	138.277.641	99,37	100,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.350.223	1.348.590	99,88	100,00
Total		140.504.275	139.626.231	99,38	100,00

Dalam rangka mendukung kegiatan pada tahun 2023, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.504.275.000. Adapun realisasi anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 139.626.231.000 atau 98,38% terhadap pagu anggaran dengan realisasi fisik mencapai 100%.

4.1.6 Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Tahun 2023

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III telah melaksanakan kegiatan tahun 2023 dengan capaian secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi Program Pusat-Daerah
Kegiatan sinkronisasi program pusat-daerah diperlukan dalam penyusunan program pembangunan khusus di bidang perumahan agar alokasi anggaran termaksimalkan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk terwujudnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensinkronkan usulan bantuan infrastruktur perumahan pada masing-masing daerah di tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan pembangunan perumahan, baik kegiatan maupun anggaran pada wilayah kerja balai tahun 2023.
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah Daerah bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kolaborasi sektor untuk mendorong pengarusutamaan Pokja PKP yang ada baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2023 diarahkan pada tiga komponen kegiatan utama, yaitu fasilitasi penguatan kemandirian Pokja PKP, fasilitasi penyusunan RP3KP dan fasilitasi basis data PKP.
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi menyangkut pemahaman dan penerapan proses dan atau hasil kegiatan yang telah dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Kegiatan ini tercapai melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU TA 2023.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2022, terdapat peningkatan persentase output kegiatan jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU. Meskipun secara umum kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III baik, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Kegagalan ini disebabkan adanya permasalahan lahan yang mempengaruhi tercapainya output kegiatan BSPS. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya, Balai Pelaksana Perumahan Sumatera III akan mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi untuk dapat mengidentifikasi calon penerima bantuan yang layak dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4.2 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

4.2.1 Perbandingan Kinerja Berdasarkan Target Per Tahun

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai Rencana Strategis 2020-2024.

Realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2020-2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24 Realisasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2020-2023

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023	
		Target PK	Realisasi	Target PK	Realisasi	Target PK	Realisasi	Target PK	Realisasi
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni									
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	9 laporan	9 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	3 laporan	6 laporan	6 laporan
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	12.410 unit	12.410 unit	7.550 unit	5.048 unit	8.380 unit	8.357 unit	10.640 unit	10.604 unit
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	459 unit	459 unit	212 unit	212 unit	371 unit	371 unit
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	16 tower	16 tower	-	-	16 tower	16 tower	17 tower	17 tower
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	30 unit	30 unit	25 unit	25 unit	2 unit	2 unit	100 unit	100 unit
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	75 unit	75 unit
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	-	-	831 unit	831 unit	370 unit	370 unit	1.975 unit	2.547 unit
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko							2 laporan	2 laporan
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan									
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 layanan	3 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	1 layanan	1 layanan
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 layanan	3 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan
3	Jumlah Layanan Perkantoran	3 layanan	3 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan

4.2.2 Perbandingan Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024

Upaya pencapaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan bentuk komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dalam mencapai target lima tahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis 2020-2024. Berikut ini realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Tabel 4.25 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2020-2024	Realisasi 2020-2023	Capaian
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	15 laporan	24 laporan	160,00%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	46.220 unit	36.419 unit	78,79%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	3.212 unit	1.042 unit	32,44%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	112 unit	49 unit	43,75%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	480 unit	157 unit	32,71%
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	60 unit	75 unit	125,00%
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	12.690 unit	3.748 unit	29,54%
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko		2 laporan	

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2020-2024	Realisasi 2020-2023	Capaian
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15 layanan	12 layanan	80,00%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	15 layanan	15 layanan	100,00%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	15 layanan	15 layanan	100,00%

Berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, terdapat beberapa kegiatan yang telah terealisasi sesuai atau melebihi target. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target. Output jumlah BSPS terealisasi 78,79% dari target, output jumlah rumah susun yang dibangun terealisasi 32,44%, output jumlah susun yang dipelihara terealisasi 43,75%, output jumlah rumah khusus yang dibangun terealisasi 32,71%, output jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU terealisasi 29,54%, dan output jumlah layanan sarana dan prasarana internal terealisasi 80%.

4.2.3 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan Capaian Organisasi Sejenis yang Setara Tahun 2023

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja serta sebagai upaya peningkatan kinerja pada waktu mendatang, Balai Pelaksana Perumahan Sumatera III melakukan perbandingan kinerja dengan capaian organisasi sejenis yang setara indikator kegiatannya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV menjadi referensi perbandingan dalam mengevaluasi capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2023 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Perbandingan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan organisasi sejenis

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		BP2P Sumatera III			BP2P Sumatera IV		
		Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 laporan	6 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 unit	10.604 unit	99,66%	4.284 unit	4.284 unit	100%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 unit	371 unit	100%	120 unit	120 unit	100%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 tower	17 tower	100%	4 tower	4 tower	100%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	100 unit	100 unit	100%	0 unit	0 unit	
6	Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	75 unit	75 unit	100%	25 unit	25 unit	100%
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 unit	2.547 unit	128,96%	915 unit	1.158 unit	126,50%
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan	100%	3 layanan	3 layanan	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 layanan	4 layanan	100%	3 layanan	3 layanan	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 layanan	4 layanan	100%	3 layanan	3 layanan	100%

Keduanya telah melaksanakan kegiatan tahun 2023 dengan upaya yang maksimal dan mencapai kinerja yang baik. Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian ini menjadi referensi untuk peningkatan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun-tahun mendatang.

4.2.4 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung dengan anggaran yang memiliki nilai berbeda dengan tahun sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan anggaran setiap kegiatan. Pagu anggaran tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Tabel 4.27 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dan tahun 2023

No	Program	2022			2023		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	7.504.274	7.488.387,558	99,79	8.866.901	8.835.672	99,65
2	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	146.215.093	145.280.748,671	99,36	196.112.573	194.696.230	99,28
3	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	114.757.868	114.639.867,199	99,90	129.577.454	129.503.677	99,94
4	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	49.879.627	49.804.268,31	99,89	140.504.275	139.626.231	99,38

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran, realisasi penyerapan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,14% dari tahun 2022. Realisasi penyerapan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,08% dari tahun 2022. Realisasi penyerapan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun 2022. Realisasi penyerapan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,51% dari tahun 2022.



4.3 Realisasi Anggaran

4.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya, lingkungan Balai Pelaksana Perumahan Sumatera III mendapatkan alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk memenuhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Alokasi anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan DIPA tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya beberapa kali mengalami revisi merujuk pada perubahan target kinerja. Pagu awal yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.171.571.000. Setelah mengalami perubahan dan revisi, pagu akhir menjadi Rp. 8.866.901.000. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III mencapai kinerja fisik 100% dengan melakukan efisiensi anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 100,35% jika diukur dari perbandingan persentase realisasi fisik dengan realisasi keuangan sebesar 99,65%.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 36 orang. Apabila diasumsikan bahwa setiap kegiatan idealnya dikerjakan oleh lima orang, maka diperoleh rasio penugasan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 yaitu 1,53 penugasan per orang. Jika diasumsikan jumlah pagu dibagikan secara merata kepada setiap pegawai, maka setiap pegawai bertanggung jawab sebesar Rp 246.302.805. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan sarana kantor dengan luasan sekitar lebih kurang 584 m².





PENUTUP



Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dan menyajikan dinamika kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023 dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perumahan melalui pelaksanaan sasaran “Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau”.

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berdampak pada progres realisasi anggaran maupun fisik kegiatan. Permasalahan yang mempengaruhi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III yaitu:

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 1) Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah/pengusul bantuan terkait *Readiness Criteria* bantuan bidang perumahan;
 - 2) Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data perumahan yang komprehensif;
 - 3) Keterbatasan dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP;
 - 4) Masih terdapat ego sektoral terkait kolaborasi data akibat minimnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan atau basis data terkait PKP;
 - 5) Adanya *refocussing* anggaran.
- b. Pelaksanaan Bantuan Perumahan
 - 1) Masih terdapat dokumen usulan yang kurang atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Pemahaman calon penerima bantuan masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan;
 - 3) Proses pelaksanaan fisik kegiatan terdampak ketersediaan bahan, alat, material, jumlah tenaga kerja, maupun kondisi cuaca;
 - 4) Kurangnya kedisiplinan para pekerja di lokasi konstruksi;
 - 5) Kelengkapan dokumen administrasi terlambat diproses;
 - 6) Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan *action plan* yang telah disusun.

B. Tindak Lanjut

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III berupaya mencapai kinerja mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 meskipun menghadapi beberapa kendala. Dalam rangka meningkatkan perbaikan kinerja sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah/pengusul bantuan terkait *Readiness Criteria* pemberian bantuan bidang perumahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pemenuhan kebutuhan data perumahan serta penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP;
- c. Melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki organisasi;
- d. Memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait persyaratan usulan maupun pelaksanaan bantuan perumahan;
- e. Memaksimalkan bahan, alat dan material lokal di sekitar lokasi pembangunan;
- f. Melakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah pekerja maupun kondisi cuaca yang tidak menentu;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan maupun kelengkapan dokumen administrasi secara rutin.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Zubaidi Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Iwan Suprijanto Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan</p> <p>Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. <p style="text-align: right;">Jakarta, 22 Desember 2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Kedua</p>  <p>Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Pertama</p>  <p>Zubaidi NIP. 19761203 200212 1 004</p> </div> </div>

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10.640 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	371 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	17 Tower
	5 Jumlah rumah khusus yang dibangun	100 Unit
	6 Jumlah rumah khusus yang dipelihara	75 Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.975 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
Kegiatan:		Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		Rp 467.487.418.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 4.932.911.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 128.422.100.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 139.154.052.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 194.978.355.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		Rp 7.573.785.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 3.933.990.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 1.155.354.000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 1.350.223.000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 1.134.218.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III		Rp 8.866.901.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau		Rp 129.577.454.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau		Rp 140.504.275.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		Rp 196.112.573.000
Total		Rp 475.061.203.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III



Zubaidi
NIP. 19761203 200212 1 004

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Pembangunan Rumah Susun



BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TAHUN 2023

Rapat : Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Pimpinan : Direktur Rumah Susun

Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun

Pada hari **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA III	371	371	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Riau	141	141	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	135	135	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	95	95	100,00 %

Demikian Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023 ini telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III** Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2023.

Jakarta, 15 Desember 2023

Disetujui oleh,
Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan
Sumatera III



Ir. Zubardi, S.T., M.T., CROP
NIP. 19761203 200212 1 004

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Pemeliharaan Rumah Susun



BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN TAHUN 2023

- Rapat : Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023
- Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023
- Pimpinan : Direktur Rumah Susun
- Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun

Pada hari **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023, dengan hasil kesepakatan *Output* Pemeliharaan Rumah Susun sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (Tower)	REALISASI (Tower)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA III	17	17	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Riau	5	5	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	4	4	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	8	8	100,00 %

Demikian Capaian *Output* Pemeliharaan Rumah Susun Tahun 2023 ini telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III** Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2023.

Jakarta, 15 Desember 2023

Disetujui oleh,

Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan
Sumatera III

Ir. Zubaidi, S.T., M.T., CROP
NIP. 19761203 200212 1 004

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Pembangunan Rumah Khusus



BERITA ACARA KESEPAKATAN

CAPAIAN *OUTPUT* PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS TAHUN 2023

Rapat	: Finalisasi Capaian <i>Output</i> Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2023
Hari/Tanggal	: Jumat, 29 Desember 2023
Pimpinan	: Direktur Rumah Khusus
Peserta	: 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Khusus

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (28-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Pembahasan Finalisasi Capaian Output Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2023:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	4.182	4.311	103,08 %

Keterangan.

Pada Paket Pembangunan Rumah Khusus Bagi Warga Pejuang Timor Timur Paket I s/d Paket III di Kabupaten Kupang dengan rencana target sebanyak 2.100 unit, menggunakan perpanjangan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (MYC) di tahun 2024.

2. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Tahun 2023:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA I	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Aceh	-	-	-
2	BALAI P2P SUMATERA II	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
3	BALAI P2P SUMATERA III	100	100	100 %
	- Satker PP Provinsi Riau	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	100	100	100 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	-	-	-
4	BALAI P2P SUMATERA IV	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Jambi	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Bengkulu	-	-	-

5	BALAI P2P SUMATERA V	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Lampung	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Kep Bangka Belitung	-	-	-
6	BALAI P2P JAWA I	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Banten	-	-	-
	- Satker PP Provinsi DKI Jakarta	-	-	-
7	BALAI P2P JAWA II	555	554	99,82%
	- Satker PP Provinsi Jawa Barat	555	554	99,82%
8	BALAI P2P JAWA III	20	20	100%
	- Satker PP Provinsi Jawa Tengah	-	-	-
	- Satker PP Provinsi DI Yogyakarta	20	20	100%
9	BALAI P2P JAWA IV	1	1	100%
	- Satker PP Provinsi Jawa Timur	1	1	100%
	- Satker PP Provinsi Bali	-	-	-
10	BALAI P2P KALIMANTAN I	6	6	100%
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Barat	5	5	100%
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	100%
11	BALAI P2P KALIMANTAN II	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-
12	BALAI P2P SULAWESI I	114	114	100%
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Utara	114	114	100%
	- Satker PP Provinsi Gorontalo	-	-	-
13	BALAI P2P SULAWESI II	3.306	3.436	103,93%
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Tengah	Loan CSRRP = 3.267 unit Reguler = 39 unit	Loan CSRRP = 3.397 unit Reguler = 39 unit	103,93%
14	BALAI P2P SULAWESI III	1	1	100%
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	100%
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-
15	BALAI P2P NUSA TENGGARA I	28	28	100%
	- Satker PP Provinsi Nusa Tenggara Barat	28	28	100%
16	BALAI P2P NUSA TENGGARA II	2.100*	-	MYC 2022 - 2023 dan dilanjutka n MYC 2023 - 2024
	- Satker PP Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.100*	-	MYC 2022 - 2023 dan dilanjutkan MYC 2023 - 2024
17	BALAI P2P MALUKU	50	50	100%

	- Satker PP Provinsi Maluku	50	50	100%
	- Satker PP Provinsi Maluku Utara	-	-	-
18	BALAI P2P PAPUA I	1	1	100%
	- Satker PP Provinsi Papua	1	1	100%
19	BALAI P2P PAPUA II	-	-	-
	- Satker PP Provinsi Papua Barat	-	-	-

Demikian Capaian *Output* Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023.

Jakarta, Januari 2024

Disetujui oleh:

Direktur Rumah Khusus

	Yusniewati	
Kepala Balai P2P Sumatera I	Kepala Balai P2P Sumatera II	Plh. Kepala Balai P2P Sumatera III
(.....)	(.....)	(Rita Hartati, S.E., M.M.)
Kepala Balai P2P Sumatera IV	Kepala Balai P2P Sumatera V	Kepala Balai P2P Jawa I
(.....)	(.....)	(.....)
Kepala Balai P2P Jawa II	Kepala Balai P2P Jawa III	Kepala Balai P2P Jawa IV
(.....)	(.....)	(.....)

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Pemeliharaan Rumah Khusus



BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN OUTPUT PELAKSANAAN KEGIATAN OPOR
RUMAH KHUSUS TAHUN 2023

Rapat	: Finalisasi Capaian <i>Output</i> Pelaksanaan Kegiatan OPOR Rumah Khusus Tahun 2023
Hari/Tanggal	: Jumat, 29 Desember 2023
Pimpinan	: Direktur Rumah Khusus
Peserta	: 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Khusus

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (28-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Pembahasan Finalisasi Capaian Output Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dari Pelaksanaan Kegiatan OPOR Rumah Khusus TA. 2023:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (unit)	REALISASI OPOR (unit)	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	254	254	100 %

2. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Tahun 2023:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI OPOR (unit)	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA I	10	10		100 %
	- Satker PP Provinsi Aceh	10	10	Optimalisasi Rumah Khusus dan Distribusi Air Bersih	100 %
2	BALAI P2P SUMATERA II	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Sumatera Utara	-	-		-
3	BALAI P2P SUMATERA III	75	75		100 %
	- Satker PP Provinsi Riau	-	-		-

	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	25	25	Jalan Lingkungan dan Turap	100 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	50	50	Jaringan Air Bersih	100 %
4	BALAI P2P SUMATERA IV	25	25		100 %
	- Satker PP Provinsi Jambi	25	25	PSU Rumah Khusus	100 %
	- Satker PP Provinsi Bengkulu	-	-		-
5	BALAI P2P SUMATERA V	16	16		100 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Selatan	16	16	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
	- Satker PP Provinsi Lampung	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Kep Bangka Belitung	-	-		-
6	BALAI P2P JAWA I	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Banten	-	-		-
	- Satker PP Provinsi DKI Jakarta	-	-		-
7	BALAI P2P JAWA II	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Jawa Barat	-	-		-
8	BALAI P2P JAWA III	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Jawa Tengah	-	-		-
	- Satker PP Provinsi DI Yogyakarta	-	-		-
9	BALAI P2P JAWA IV	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Jawa Timur	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Bali	-	-		-
10	BALAI P2P KALIMANTAN I	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Barat	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Tengah	-	-		-
11	BALAI P2P KALIMANTAN II	30	30		100 %
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Selatan	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Timur	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Kalimantan Utara	30	30	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
12	BALAI P2P SULAWESI I	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Utara	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Gorontalo	-	-		-
13	BALAI P2P SULAWESI II	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Barat	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Tengah	-	-		-
14	BALAI P2P SULAWESI III	16	16		100 %

	- Satker PP Provinsi Sulawesi Selatan	16	16	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
	- Satker PP Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-		-
15	BALAI P2P NUSA TENGGARA I	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-		-
16	BALAI P2P NUSA TENGGARA II	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-		-
17	BALAI P2P MALUKU	30	30		100 %
	- Satker PP Provinsi Maluku	10	10	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
		20	20	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
	- Satker PP Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-
18	BALAI P2P PAPUA I	52	52		100 %
	- Satker PP Provinsi Papua	20	20	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
		20	20	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
		12	12	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus	100 %
19	BALAI P2P PAPUA II	-	-		-
	- Satker PP Provinsi Papua Barat	-	-		-

Demikian Capaian *Output* Pelaksanaan Kegiatan OPOR Rumah Khusus Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023.

Jakarta, Januari 2024

Disetujui oleh:

Direktur Rumah Khusus

Yusniewati

Kepala Balai P2P Sumatera I	 Plh. Kepala Balai P2P Sumatera III	Kepala Balai P2P Sumatera IV
(.....)	(Rita Hartati, S.E., M.M.)	(.....)
Kepala Balai P2P Sumatera V	Kepala Balai P2P Kalimantan II	Kepala Balai P2P Sulawesi III
(.....)	(.....)	(.....)
Kepala Balai P2P Maluku	Kepala Balai P2P Papua I	
(.....)	(.....)	

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Bantuan PSU



BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* BANTUAN PSU TAHUN 2023

Rapat : Finalisasi Capaian *Output* Bantuan PSU Tahun 2023
 Hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023
 Pimpinan : Direktur Rumah Umum dan Komersial
 Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
 2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (29-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Pembahasan Finalisasi Capaian *Output* Bantuan PSU Tahun 2023, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA III	1975	2547	128,96 %
	- Satker PP Provinsi Riau	450	598	132,89 %
	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	875	1096	125,26 %
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	650	853	131,23 %

Demikian Capaian *Output* Bantuan PSU Tahun 2023 ini telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III** Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023.

Jakarta, 29 Desember 2023

Disetujui oleh,

Kepala Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan
Sumatera III



SE. Zubaidi S.T., M.T., CROP
 NIP. 19761203 200212 1 004

Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya



BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN OUTPUT BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
TAHUN 2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (29-12-2023) telah ditetapkan Capaian Hasil Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya TA. 2023 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan hasil sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P SUMATERA III	10.640	10.604	99,66%
	- Satker PP Provinsi Riau	3.062	3.062	100,00%
	- Satker PP Provinsi Kepulauan Riau	1.500	1.500	100,00%
	- Satker PP Provinsi Sumatera Barat	6.078	6.042	99,41%

Demikian Capaian *Output* Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2023.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Disetujui oleh:

Kepala Balai P2P Sumatera III



W. Supandi, S.T., M.T., CROP
 NIP. 19761203 200212 1 004

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to certify that the following organization

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P) SUMATERA III

Jalan Diponegoro No. 45, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru, Riau, Indonesia

has been audited and found to meet the requirements of

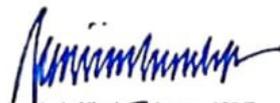
SNI ISO 37001:2016

Anti-Bribery Management Systems - Requirements with guidance for use

Certification scope:

Implementation of the construction of flats, special houses, self-supporting houses, infrastructure, facilities and public utilities as well as coordination of land provision and residential development.

Certificate number : ABMS – 110
Issue version : 2023-1
Certificate start date : 27 July 2023
Certificate expiry date : 27 July 2026
Initial certificate issue date : 27 July 2023
Previous certificate expiry date : N/A
Last recertification audit date : N/A



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
President Director



This certification is accredited under Komite Akreditasi Nasional (KAN) with accreditation number LSSMAP-004-IDN

This certificate is issued by, and remain the property of, PT. Mutuagung Lestari (MUTU International) located in Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Indonesia, which shall be returned or destroyed if requested. Authenticity of this certificate can be verified on www.mutucertification.com or by inquiries to msc@mutucertification.com. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this certificate is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Pemberian Sertifikat SMAP dari Lembaga Sertifikasi SMAP



Seremonial Penyerahan Sertifikat SMAP oleh Direktur Jenderal Perumahan

Dokumentasi Apresiasi



Dokumentasi Apresiasi



Penghargaan Tertib Pelaksanaan Tugas PPK Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Kepulauan Riau dari Ditjen Bina Konstruksi



Penghargaan Unit Pemilik Risiko (UPR) T3 yang berkomitmen dalam penerapan Manajemen Risiko TA 2022 kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Dokumentasi Apresiasi



Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Sumatera Barat



Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Sumatera Barat



Pemeliharaan Rumah Susun Universitas Andalas



Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumatera Barat



PSU Perumahan Pesona Anai Lestari



Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Sumatera Barat





PSU Perumahan Griya Hannah Asri Air Haji



PSU Perumahan Griya Hannah Asri Tarusan



PSU Perumahan Bungo Pasang Asri



PSU Perumahan D'Talago Green View

Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Riau



Rumah Susun UMRI



0%



30%



100%

Progres pelaksanaan BSPS

Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau





PSU Perumahan Graha Mentarau



PSU Perumahan Dutama Paragon Residence



PSU Perumahan Permata Galaxy



PSU Perumahan Telaga Surya Regency



Rumah Khusus Huntap Pascabencana Longsor di Serasan



Rumah Khusus Huntap Pascabencana Longsor di Serasan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT